

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI ACEH

AGUSTUS 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Aceh

AGUSTUS
2026

Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging market* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku “Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Agustus 2026” ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh realisasi berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,09% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, LU Konstruksi dan LU Pertanian. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Aceh tercermin dari tetap tingginya kinerja Konsumsi Pemerintah dan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.
2. Pada triwulan II 2026, inflasi Aceh tercatat 5,84% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 5,31% (yoy). Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bensin akibat penyesuaian BBM nonsubsidi, penurunan pasokan pangan dari siklus tanam cabai dan beras serta anomali cuaca, efek pascabencana yang memicu *price rigidity* pada nasi dengan lauk, dan lonjakan harga emas perhiasan akibat ketegangan geopolitik global. Meskipun demikian, laju inflasi tersebut berhasil tertahan oleh normalisasi konsumsi pasca-HBKN Iduladha dan Meugang serta pulihnya konektivitas logistik.
3. Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan pembiayaan diiringi dengan kualitas yang baik tercermin dari masih rendahnya *Non-Performing Financing* (NPF). Selain itu, inklusivitas pembiayaan juga menunjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 25,30%. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami ekspansi sebesar 10,54% (yoy).
4. Pada triwulan II 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung aktivitas perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, tercermin dari terjadinya net outflow pada triwulan laporan. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai, khususnya melalui penggunaan APMK dan QRIS, terus menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan.
5. Kinerja perekonomian Provinsi Aceh secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,60%-5,10% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%. Hal ini seiring dengan pembangunan dan rekonstruksi daerah pascabencana, serta normalisasi aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, laju inflasi Provinsi Aceh di tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy), didukung oleh pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

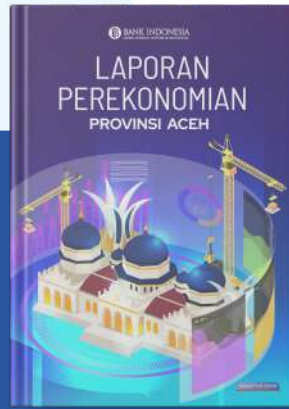
Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Agustus 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Agus Chusaini
Kepala Perwakilan



Survei Tingkat Kepuasan *Stakeholders* Terhadap Kualitas Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh Periode Agustus 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh, Bank Indonesia melakukan survei tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap LPP. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenaan Saudara untuk dapat meluangkan waktunya dan mengisi survei melalui QR Code/link berikut ini :



https://bit.ly/Survei_LPP_Aceh_Agustus2026

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi
sdr. Muhammad Raziq Ilmi / 0812 5397 3784
Email : mraziq_ilmi@bi.go.id

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator	xii

01

Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1. Gambaran umum	2
1.2. Sisi Permintaan	2
1.3. Sisi Lapangan Usaha	7
Boks 1 Perkembangan Optimasi Lahan Pertanian Pasca Bencana Hidrometeorologi di Aceh	12

02

Perkembangan Inflasi Daerah

2.1. Perkembangan Umum Inflasi	16
2.2. Analisis Perkembangan Inflasi	16
2.3. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan III 2026 dan Inflasi 2026	20
2.4. Inflasi Spasial	21
2.4.1. Gambaran Umum	21
2.4.2. Inflasi Kota Banda Aceh	22
2.4.3. Inflasi Kota Lhokseumawe	22
2.4.4. Inflasi Kota Meulaboh	22
2.4.5. Inflasi Kabupaten Aceh Tengah	23
2.4.6. Inflasi Kabupaten Aceh Tamiang	23
2.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh	23
Boks 2 Kasus Karhutla di Provinsi Aceh Relatif Terbatas Sehingga Implikasinya Minim Terhadap Sektor Pertanian Serta Inflasi Pangan.	25

03

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

3.1. Kondisi Umum	28
3.2. Intermediasi Perbankan	29
3.2.1. DPK Menurut Jenisnya	29
3.2.2. DPK Menurut Kepemilikan	29
3.2.3. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan	30
3.2.4. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)	31
3.2.5. Pembiayaan UMKM	31
3.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh	31

04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1. Sistem Pembayaran Tunai	36
4.2. Sistem Pembayaran Non Tunai	36
4.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	38
4.4. Penyaluran PKH dan Program Sembako	39

05

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1. Ketenagakerjaan	44
5.2. Kemiskinan	45

06

Prospek Perekonomian

6.1. Prospek Makroekonomi	50
6.2. Prospek Inflasi	51
6.3. Rekomendasi Kebijakan	52

Daftar Grafik

01

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2026 (% yoy)	2
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi	2
Grafik 1.3.	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan II 2026	3
Grafik 1.4.	Pertumbuhan Konsumsi RT	3
Grafik 1.5.	Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	3
Grafik 1.6.	Perkembangan Survei Konsumen	3
Grafik 1.7.	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	4
Grafik 1.8.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan	4
Grafik 1.9.	Pertumbuhan PMTB	6
Grafik 1.10.	Perkembangan Pembiayaan Investasi	6
Grafik 1.11.	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6
Grafik 1.12.	Perkembangan Ekspor Batubara	6
Grafik 1.13.	Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi Aceh	7
Grafik 1.14.	Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Provinsi Aceh	7
Grafik 1.15.	Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa	7
Grafik 1.16.	Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri	7
Grafik 1.17.	Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan II 2026	7
Grafik 1.18.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	8
Grafik 1.19.	Perkembangan Pembiayaan Pertanian	8
Grafik 1.20.	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	8
Grafik 1.21.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	9
Grafik 1.22.	Pertumbuhan Penjualan Kendaraan	9
Grafik 1.23.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	9
Grafik 1.24.	Perkembangan Pengadaan Semen	9
Grafik 1.25.	Pertumbuhan PMTB	9
Grafik 1.26.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	10
Grafik 1.27.	Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	10
Grafik 1.28.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	10
Grafik 1.29.	Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue	10
Grafik 1.30.	Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda	10
Grafik 1.31.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11
Grafik 1.32.	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri	11
Grafik 1.33.	Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan	11
Grafik 1.34.	Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin	11
Grafik 1.35.	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	11

02

Grafik 2.1.	Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2026 (% , yoy)	16
Grafik 2.2.	Perkembangan Harga Emas Dunia	20
Grafik 2.3.	Perkembangan Survei Konsumen	20
Grafik 2.4.	Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy)	21

03

Grafik 3.1.	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)	28
Grafik 3.2.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga	28
Grafik 3.3.	Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh Berdasarkan Lokasi Proyek)	28
Grafik 3.4.	Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (Berdasarkan Lokasi Bank)	28
Grafik 3.5.	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)	29
Grafik 3.6.	Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)	29
Grafik 3.7.	Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)	29
Grafik 3.8.	Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis	29
Grafik 3.9.	Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)	29
Grafik 3.10.	Perkembangan DPK Perseorangan	30
Grafik 3.11.	Perkembangan DPK Pemerintah	30
Grafik 3.12.	Perkembangan DPK Korporasi	30
Grafik 3.13.	Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)	30
Grafik 3.14.	Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan	31
Grafik 3.15.	Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha	31
Grafik 3.16.	Perkembangan Pembiayaan UMKM	31

04

Grafik 4.1.	Netflow Kas (Rp Triliun)	36
Grafik 4.2.	Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% , yoy)	36
Grafik 4.3.	Temuan Uang Palsu (Lembar)	36
Grafik 4.4.	Perkembangan SKNBI	36
Grafik 4.5.	Perkembangan BI-RTGS	37
Grafik 4.6.	Transaksi ATM Debit	37
Grafik 4.7.	Transaksi Kartu Kredit	37
Grafik 4.8.	Perkembangan Transaksi UE	38

Grafik 4.9.	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS	38
Grafik 4.10.	Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	38
Grafik 4.11.	Transaksi KUPVA BB	39
Grafik 4.12.	Disagregasi Transaksi UKA	39
Grafik 4.13.	Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)	39
Grafik 4.14.	Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)	39
Grafik 4.15.	Perkembangan Program Sembako (Nominal)	40
Grafik 4.16.	Perkembangan Program Sembako (KPM)	40

05

Grafik 5.1.	Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)	44
Grafik 5.2.	Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	46
Grafik 5.3.	Penduduk Miskin di Sumatera (%)	46
Grafik 5.4.	Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah	47

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2026	4
Tabel 1.2.	Realisasi Belanja APBN Triwulan II 2026	5
Tabel 2.1.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026	16
Tabel 2.2.	Inflasi Kelompok Barang dan Jasa	16
Tabel 2.3.	Inflasi Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau	17
Tabel 2.4.	Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Khaki	17
Tabel 2.5.	Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	18
Tabel 2.6.	Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT	18
Tabel 2.7.	Inflasi Kel. Kesehatan	18
Tabel 2.8.	Inflasi Kel. Transportasi	18
Tabel 2.9.	Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	19
Tabel 2.10.	Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	19
Tabel 2.11.	Inflasi Kel. Pendidikan	19
Tabel 2.12.	Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	19
Tabel 2.13.	Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	20
Tabel 2.14.	Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% ,yoy)	22
Tabel 2.15.	Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% ,yoy)	22
Tabel 2.16.	Andil Inflasi di Meulaboh (% ,yoy)	22
Tabel 2.17.	Andil Inflasi di Aceh Tengah (% ,yoy)	23
Tabel 2.18.	Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% ,yoy)	23
Tabel 5.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	44
Tabel 5.2.	Perkembangan TPT	44
Tabel 5.3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	44
Tabel 5.4.	Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)	45
Tabel 5.5.	Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	45
Tabel 5.6.	Nilai Tukar Petani	45
Tabel 5.7.	Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan	46
Tabel 5.8.	Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)	46
Tabel 6.1.	Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2026 (% ,yoy)	50

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026



Perkembangan Ekonomi Daerah

Ekonomi Aceh tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh realisasi berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi

Ekonomi Aceh tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh realisasi berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,09% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, LU Konstruksi dan LU Pertanian. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Aceh tercermin dari tetap tingginya kinerja Konsumsi Pemerintah dan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan II 2026, inflasi Aceh tercatat 5,84% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 5,31% (yoy).

Perkembangan pascabencana dan berlanjutnya ketegangan geopolitik global berdampak pada masih tingginya inflasi Aceh. Pada triwulan II 2026, inflasi Aceh tercatat 5,84% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 5,31% (yoy). Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bensin akibat penyesuaian BBM nonsubsidi, penurunan pasokan pangan dari siklus tanam cabai dan beras serta anomali cuaca, efek pascabencana yang memicu second round effect pada nasi dengan lauk, dan lonjakan harga emas perhiasan akibat ketegangan geopolitik global. Meskipun demikian, laju inflasi tersebut berhasil tertahan oleh normalisasi konsumsi pasca-HBKN Iduladha dan Meugang serta pulihnya konektivitas logistik.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan pembiayaan diiringi dengan kualitas yang baik tercermin dari masih rendahnya *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu, inklusivitas

pembiayaan juga menunjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 25,30%. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami ekspansi sebesar 10,54% (yoy).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung aktivitas perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, tercermin dari terjadinya net outflow pada triwulan laporan. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai, khususnya melalui penggunaan APMK dan QRIS, terus menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

Pada triwulan II 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Mei 2026 sebesar 5,89%, stabil dibandingkan kondisi Februari 2026 yang sebesar 5,88%. Kondisi tersebut didukung oleh kualitas ketenagakerjaan yang cenderung membaik, tercermin dari meningkatnya proporsi pekerja formal dan menurunnya tingkat setengah pengangguran. Selain itu, jumlah penduduk bekerja juga bertambah sekitar 15 ribu orang dibandingkan Februari 2026, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih mampu menciptakan peluang kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Mei 2026 sebesar 5,89%, stabil dibandingkan kondisi Februari 2026 yang sebesar 5,88%.

Prospek Perekonomian

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,60%-5,10% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi Aceh seiring dengan pembangunan dan rekonstruksi daerah pascabencana, serta normalisasi aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, laju inflasi Provinsi Aceh di tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy), didukung oleh pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,60%-5,10% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%.

Tabel Indikator

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Sektoral (Rp Triliun)	2024		2025				2026	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,07	11,74	10,58	10,51	10,71	11,83	10,61	10,93
Pertambangan dan Penggalian	2,91	2,95	3,11	3,04	3,02	2,42	2,83	3,11
Industri Pengolahan	1,66	1,71	1,65	1,73	1,75	1,73	1,74	1,81
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Konstruksi	3,78	4,11	3,27	3,46	3,77	3,76	3,79	3,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	6,27	6,18	6,19	6,28	6,26	6,66	6,68
Transportasi dan Pergudangan	2,95	2,94	2,84	3,26	3,10	2,83	2,86	3,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,59	0,59	0,58	0,59	0,64	0,58	0,65	0,64
Informasi dan Komunikasi	1,70	1,64	1,64	1,70	1,81	1,60	1,67	1,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,57	0,56	0,57	0,59	0,64	0,66	0,64
<i>Real Estate</i>	1,62	1,59	1,57	1,65	1,74	1,63	1,63	1,55
Jasa Perusahaan	0,25	0,24	0,24	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,33	3,49	3,27	3,47	3,34	3,59	3,51	3,71
Jasa Pendidikan	1,04	1,01	1,00	1,06	1,11	1,04	1,04	1,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,33	1,22	1,32	1,37	1,30	1,29	1,35
Jasa lainnya	0,64	0,60	0,60	0,64	0,64	0,60	0,62	0,65
PDRB	38,50	40,85	38,28	39,54	40,21	40,19	39,95	41,46

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)

Sektoral Growth (% , yoy)	2024		2025				2026	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,38%	1,11%	0,91%	6,93%	6,36%	0,85%	0,35%	3,98%
Pertambangan dan Penggalian	6,86%	14,68%	19,02%	1,12%	3,79%	-17,79%	-9,05%	2,41%
Industri Pengolahan	2,92%	2,81%	5,49%	6,50%	5,68%	1,07%	6,03%	4,93%
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	4,49%	3,93%	-4,77%	0,53%	5,24%	-11,71%	6,34%	4,62%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,89%	0,25%	1,14%	5,82%	0,04%	-8,61%	-1,97%	-2,01%
Konstruksi	6,02%	0,05%	-0,11%	-0,28%	-0,07%	-8,42%	15,95%	13,36%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,96%	-0,02%	5,87%	6,13%	6,28%	-0,06%	7,88%	7,99%
Transportasi dan Pergudangan	19,46%	21,12%	9,76%	13,37%	5,09%	-3,60%	0,91%	0,58%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36%	0,34%	6,26%	5,97%	7,78%	-0,61%	13,54%	9,84%
Informasi dan Komunikasi	5,36%	0,50%	0,03%	2,96%	6,27%	-1,97%	2,21%	0,89%
Jasa Keuangan dan Asuransi	58,69%	0,29%	0,34%	0,96%	0,64%	13,56%	17,96%	12,32%
<i>Real Estate</i>	0,10%	4,32%	1,13%	6,45%	7,28%	2,89%	3,86%	-5,95%
Jasa Perusahaan	7,38%	0,54%	0,60%	-2,24	-1,88%	1,52%	2,24%	3,20%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,39%	7,48%	7,81%	-0,22	0,26%	2,91%	7,67%	7,00%
Jasa Pendidikan	6,76%	7,71%	0,73%	2,28	6,67%	4,10%	5,18%	3,13%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,70%	9,40%	7,99%	3,46	-0,30%	-1,30%	5,70%	2,26%
Jasa lainnya	4,09%	9,12%	4,69%	3,15	0,64%	-0,07%	4,24%	0,82%
PDRB	5,17%	4,15%	4,59%	4,82%	4,46%	-1,61%	4,09%	4,86%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran (Rp Triliun)

Komponen (Rp Triliun)	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Konsumsi Rumah Tangga	20,39	20,83	20,76	20,89	21,41	21,86	21,76	20,31	21,93	22,52
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,87	0,75	0,80	0,89	0,86	0,86	0,79	0,93	0,98	0,95
Konsumsi Pemerintah	4,15	6,36	6,19	8,10	4,48	5,76	5,83	7,87	5,62	7,02
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,58	12,49	12,82	13,09	11,57	12,22	12,78	12,63	12,81	13,54
Perubahan Inventori	0,32	-0,12	0,13	-0,11	0,67	0,63	-0,79	-0,07	0,02	0,03
Ekspor Barang dan Jasa	18,05	18,21	21,61	23,73	22,34	21,41	22,37	22,28	21,51	22,22
Impor Barang dan Jasa	18,66	20,78	23,81	25,75	22,94	22,65	23,25	23,58	23,21	24,84
PDRB	36,70	37,72	38,50	40,85	38,38	39,54	40,21	40,19	39,95	41,46

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen (Rp Triliun)	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,93%	4,24%	3,85%	4,32%	4,99%	4,97%	4,85%	-2,79%	2,47%	3,05%
Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	29,34%	10,67%	18,95%	7,51%	-1,11%	16,32%	-1,44%	5,85%	14,81%	9,83%
Konsumsi Pemerintah	21,10%	6,89%	5,36%	12,44%	7,99%	-9,40%	-5,62%	-2,86%	25,39%	21,85%
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,77%	6,36%	5,95%	5,49%	-0,11%	-2,13%	-0,29%	-3,52%	10,76%	10,78%
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	10,14%	-3,74%	7,68%	11,31%	23,75%	17,62%	3,50%	-6,09%	-3,67%	3,79%
Impor Barang dan Jasa	11,59%	-0,37%	5,75%	14,91%	22,94%	8,99%	-2,36%	-8,41%	1,19%	9,67%
PDRB	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%	4,59%	4,82%	4,46%	-1,61%	4,09%	4,86%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi (% , yoy)	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Banda Aceh	2,52	2,07	1,84	2,16	1,36	2,63	3,67	6,10	5,20	5,54
Lhokseumawe	2,79	2,97	2,11	2,79	1,63	2,07	4,19	5,56	5,46	5,07
Meulaboh	4,39	3,94	2,40	3,29	1,46	3,07	4,63	5,56	4,95	3,89
Aceh Tamiang	3,38	3,14	0,99	1,77	1,28	1,33	4,80	7,13	4,84	6,45
Aceh Tengah	4,51	4,78	0,47	1,63	2,02	1,97	5,80	8,90	6,07	7,25
Provinsi Aceh	3,25	3,09	1,50	2,17	1,53	2,19	4,45	6,71	5,31	5,84

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Aset (Rp Triliun)	56,03	57,67	59,99	63,93	61,30	62,46	63,20	61,89	64,81	64,06
Pertumbuhan (yoy)%	9,78	10,85	11,57	10,54	9,41	8,31%	5,35%	1,94%	5,74%	2,57%
DPK (Rp Triliun)	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77	46,05	44,98	48,30	49,49
Pertumbuhan (yoy)%	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27%	3,05%	-1,51%	11,48%	10,54%
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	39,06	40,80	42,51	43,98	44,49	45,04	45,98	47,05	48,75	50,38
Pertumbuhan (yoy)%	10,28	13,04	13,45	14,04	13,89	10,40%	8,16%	6,97%	9,59%	11,86%
FDR %	94,38	94,14	95,14	96,32	102,67	100,60	99,83	104,61	100,94	101,80%
NPF-gross %	1,68	1,61	1,64	1,79	1,95	2,06%	2,05%	2,22%	2,16%	2,11%
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,66	0,66	0,70	0,78	0,86	0,92	0,94	1,04	1,05	1,06

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total (Rp Triliun)	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33	44,77	46,06	44,98	48,30	49,49
Pertumbuhan (yoy)%	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67	3,27	3,05	-1,51	11,48	10,54
Giro (Rp Triliun)	7,92	8,81	10,51	6,00	6,56	7,41	8,47	6,98	9,76	9,29
Pertumbuhan (yoy)%	14,71	30,85	28,41	5,15	-17,11	-15,91	3,05	16,38	48,71	25,32
Tabungan (Rp Triliun)	22,99	24,35	24,19	27,11	25,63	25,51	25,67	30,02	29,52	30,79
Pertumbuhan (yoy)%	6,71	8,12	9,60	8,50	11,49	4,79	6,16	10,74	15,15	20,67
Deposito (Rp Triliun)	10,48	10,19	10,00	12,56	11,12	11,85	11,90	7,97	9,02	9,42
Pertumbuhan (yoy)%	-0,47	6,08	3,98	11,76	6,16	16,25	19,10	-36,51	-18,94	-20,52

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Kredit (Rp Triliun)	39,07	40,81	42,52	43,98	44,49	45,04	45,98	47,04	48,75	50,38
Pertumbuhan (yoy) %	10,28	13,04	13,45	14,02	13,89	10,40	8,16%	6,97	9,59	11,86
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,52	7,19	7,43	7,29	7,03	6,88	6,84	6,55	6,44	6,54
Pertumbuhan (yoy)%	0,05	8,65	10,07	6,89	8,20	-4,00	-7,84	-10,18	-8,47	-5,03
Investasi (Rp Triliun)	5,88	6,30	6,77	7,52	7,74	7,74	7,97	8,14	8,27	8,65
Pertumbuhan (yoy)%	40,41	38,20	28,91	33,57	31,62	22,85	17,80	8,27	6,86	11,76
Konsumsi (Rp Triliun)	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,40	31,16	32,34	34,03	35,18
Pertumbuhan (yoy)%	7,87	9,60	11,15	11,63	11,37	11,31	10,04	10,92	14,59	15,71

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Kredit (Rp Triliun)	48,66	49,76	51,11	51,87	52,64	51,87	52,90	53,15	55,85	59,02
Pertumbuhan (yoy) %	0,57	1,61	2,46	4,66	8,21	4,27	3,53	2,93	6,11	13,79
Modal Kerja (Rp Triliun)	11,42	11,77	11,82	12,87	11,52	10,31	10,29	9,32	10,17	10,87
Pertumbuhan (yoy)%	-5,42	-6,78	-5,22	1,98	1,02	-12,32	-12,82	-16,79	-11,76	5,47
Investasi (Rp Triliun)	8,77	8,91	9,23	9,37	9,85	9,65	9,94	10,08	10,24	11,13
Pertumbuhan (yoy)%	-10,16	-7,43	-9,15	-8,53	12,38	8,35	7,82	4,27	4,03	15,32
Konsumsi (Rp Triliun)	28,47	29,08	30,06	30,38	31,26	31,90	32,65	33,75	35,43	37,01
Pertumbuhan (yoy)%	7,03	8,83	10,29	10,74	9,81	9,73	8,64	9,68	13,35	16,02

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektoral (Rp Triliun)	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	2,33	3,01	3,28	3,44	3,50	3,48	3,58	3,60	3,64	3,79
Perikanan	0,32	0,31	0,31	0,30	0,28	0,28	0,27	0,25	0,25	0,25
Pertambangan	0,06	0,06	0,13	0,11	0,13	0,19	0,19	0,27	0,22	0,27
Ind, Pengolahan	1,31	1,34	1,34	1,55	1,48	1,33	1,30	1,34	1,32	1,36
Listrik, Gas & Air	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,91	0,12	0,11	0,10
Konstruksi	0,54	0,57	0,54	0,52	0,46	0,59	0,61	0,51	0,44	0,45
Perdagangan	5,52	5,77	6,04	6,25	6,21	6,08	6,08	5,90	6,01	6,14
Hotel & Restoran	0,47	0,51	0,53	0,56	0,62	0,63	0,65	0,66	0,68	0,70
Transportasi, Gudang & Kom,	0,27	0,28	0,31	0,33	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,31
Perantara Keuangan	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,24	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26	0,25	0,26	0,30	0,27
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,31	0,31	0,35	0,37	0,38	0,42	0,45	0,46	0,45	0,45
Jasa Kemasyarakatan	0,77	0,81	0,82	0,83	0,82	0,79	0,79	0,77	0,79	0,84
Jasa Perseorangan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70	30,41	31,16	32,34	34,03	35,18
TOTAL	39,07	40,81	42,52	43,98	44,48	45,04	45,98	47,04	48,75	50,38

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektoral (Rp Triliun)	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	4,15	4,58	4,56	4,77	4,79	4,74	4,86	4,89	4,90	5,42
Perikanan	0,32	0,32	0,31	0,31	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,28
Pertambangan	1,48	1,16	1,35	1,81	1,78	0,41	0,43	0,49	0,73	0,35
Ind, Pengolahan	4,30	4,43	4,22	3,22	3,70	3,93	3,96	2,91	3,51	4,19
Listrik, Gas & Air	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,40	0,39	0,86	0,89	0,87
Konstruksi	0,89	0,86	0,94	0,88	0,86	0,92	0,96	0,89	0,82	0,91
Perdagangan	6,27	6,48	6,72	6,88	6,90	6,52	6,52	6,25	6,40	6,94
Hotel & Restoran	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,67	0,68	0,69	0,71	0,76
Transportasi, Gudang & Kom,	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38	0,40	0,38	0,35	0,33	0,34
Perantara Keuangan	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04	0,10	0,11	0,14	0,12
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27	0,27	0,29
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,01
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,32	0,33	0,36	0,38	0,39	0,43	0,45	0,46	0,45	0,45
Jasa Kemasyarakatan	0,78	0,82	0,84	0,85	0,84	0,81	0,80	0,78	0,80	0,88
Jasa Perseorangan	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	28,47	29,08	30,06	30,77	31,26	31,90	32,65	33,75	35,43	37,01
TOTAL	48,66	49,76	51,11	51,64	52,64	51,87	52,90	53,15	55,85	59,02

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah



01.

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



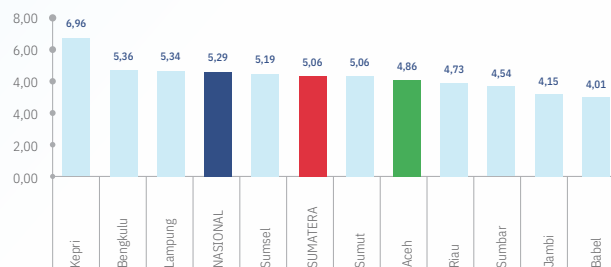


Ekonomi Aceh tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh realisasi berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,09% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, LU Konstruksi dan LU Pertanian. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Aceh tercermin dari tetap tingginya kinerja Konsumsi Pemerintah dan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.

1.1. Gambaran umum

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,61% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan Nasional, ekonomi Sumatera pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,13% (yoy) (Grafik 1.1). Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 mengalami akselerasi dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2026 (% yoy)

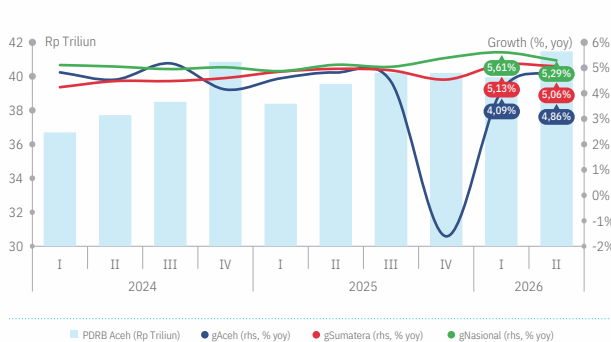


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kinerja Perekonomian Aceh Triwulan II 2026

Pada triwulan laporan, ekonomi Aceh tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Kinerja ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 4,86% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,09% (yoy) (Grafik 1.2). Namun demikian, kinerja ekonomi Aceh tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera maupun Nasional yang masing-masing tumbuh sebesar 5,06% (yoy) dan 5,29% (yoy).

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh terutama didorong oleh peningkatan kinerja LU Konstruksi seiring berlanjutnya proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Pertanian, dan LU Administrasi Pemerintah. Kinerja LU Konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh percepatan berbagai proyek rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, maupun oleh pihak swasta. Sejalan dengan progres rehabilitasi tersebut, kinerja LU Pertanian juga mengalami akselerasi pertumbuhan. Di sisi lain, LU Administrasi Pemerintah juga mengalami peningkatan yang didukung oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBA.

Sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 juga didukung oleh peningkatan kinerja dari sisi permintaan. Akselerasi pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh tetap tingginya kinerja konsumsi pemerintah dan investasi (PMTB), serta membaiknya konsumsi rumah tangga.

Di tengah perbaikan kinerja ekonomi tersebut, kontribusi ekonomi Aceh terhadap ekonomi Sumatera masih terbatas. Pada triwulan II 2026, pangsa ekonomi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar 4,78%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,88%. Kontribusi tersebut berada di atas Provinsi Bengkulu (2,15%) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2,25%). Adapun provinsi dengan kontribusi terbesar ke perekonomian Sumatera adalah Sumatera Utara (23,37%), Riau (22,33%), dan Sumatera Selatan (13,64%).

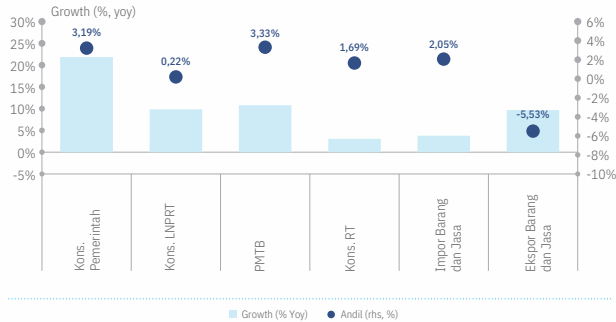
1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh terutama bersumber dari tetap tingginya kinerja investasi (PMTB), konsumsi pemerintah, serta perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga. Pada triwulan II 2026, PMTB tumbuh tinggi sebesar 10,78% (yoy), sehingga menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Aceh dengan andil pertumbuhan sebesar 3,33% (yoy), disusul oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,85% (yoy) dengan andil sebesar 3,19% (yoy), serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh 3,05% (yoy) dengan andil sebesar 1,69% (yoy) (Grafik 1.3).

Meningkatnya kinerja PMTB pada triwulan laporan juga didukung oleh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari pihak swasta dan pemerintah, serta didukung oleh program prioritas pemerintah antara lain percepatan pembangunan

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan berlanjutnya implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, meningkatnya konsumsi pemerintah pada triwulan laporan terutama didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah baik dari APBN dan APBA, untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.

Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan II 2026

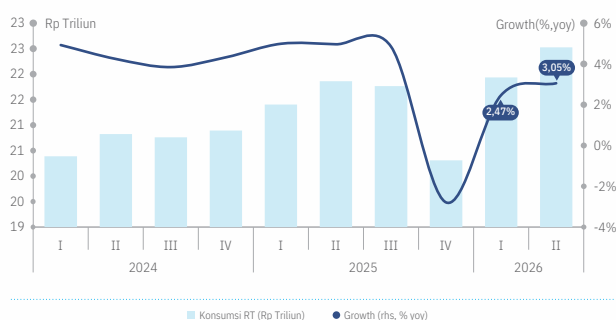


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan II 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,05% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,47% (yoy) (Grafik 1.4). Perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama HBKN Iduladha, libur sekolah, dan libur *long-weekend* di bulan April dan Mei. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga didukung oleh berangsur pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca bencana hidrometeorologi.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT

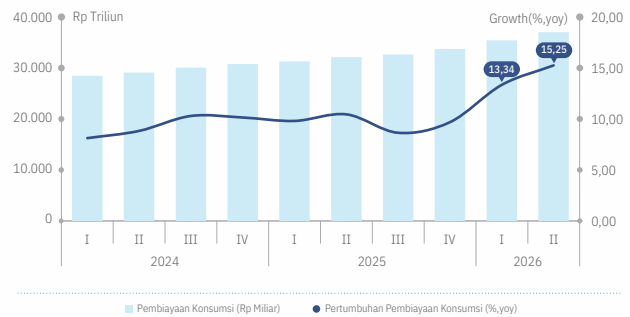


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Penguatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari meningkatnya pembiayaan konsumsi. Pada triwulan II 2026, pembiayaan konsumsi tumbuh sebesar 15,25% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 13,34% (yoy) (Grafik 1.5). Peningkatan tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk mendukung pemulihan

pascabencana hidrometeorologi. Selain itu, tingginya kebutuhan konsumsi selama HBKN Iduladha dan perayaan tradisi *Meugang* turut mendorong peningkatan permintaan pembiayaan konsumsi oleh masyarakat.

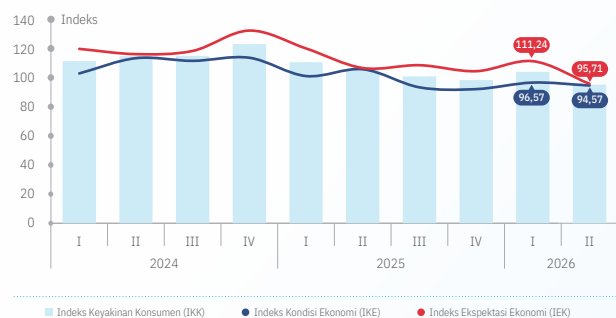
Grafik 1.5. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi



Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Namun demikian, hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan termoderasinya optimisme konsumen Aceh dibandingkan triwulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 95,14, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,90. Moderasi tersebut juga tercermin pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK). IKE menurun dari 96,57 pada triwulan I 2026 menjadi 94,57 pada triwulan II 2026, sementara IEK turun dari 111,24 menjadi 95,71 pada periode yang sama.

Grafik 1.6. Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah tetap menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2026. Pada triwulan laporan, konsumsi pemerintah tetap tumbuh tinggi sebesar 21,86% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,46% (yoy). Tingginya pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah baik dari APBN dan APBA, untuk

mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi dan implementasi program prioritas pemerintah. Selain itu, pertumbuhan yang tinggi juga dipengaruhi oleh *base effect* konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 yang tercatat berkontraksi sebesar -9,41% (yoy). (Grafik 1.7.).

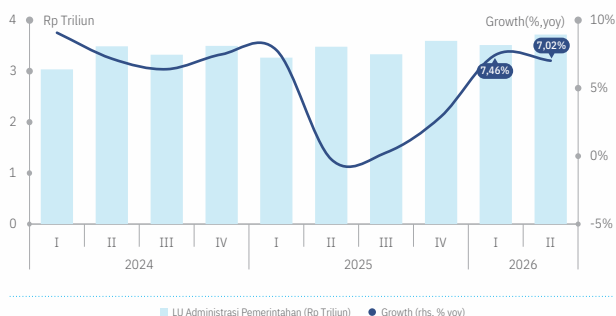
Grafik 1.7. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sejalan dengan melambatnya kinerja Konsumsi Pemerintah, kinerja LU Administrasi Pemerintah juga termoderasi pada triwulan II 2026. LU Administrasi Pemerintah pada triwulan laporan tumbuh sebesar 7,02% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 7,46% (yoy) (Grafik 1.8.).

Grafik 1.8. Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tabel 1.1. Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2026

REALISASI APBD – dalam Triliun Rupiah				
Uraian	Triwulan II 2026			Growth Realisasi (% yoy)
	Pagu APBD	Realisasi s.d. 30Juni	% Realisasi	
A. PENDAPATAN DAERAH	41,20	19,64	47,67	48,75
I. Pendapatan Asli Daerah	8,55	2,59	30,33	23,88
Pajak Daerah	3,15	1,28	40,70	29,08
Retribusi Daerah	1,77	0,64	36,50	101,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,44	0,03	7,49	-89,55
Lain-lain PAD yang Sah	3,17	0,62	19,78	-36,97
II. Pendapatan dari Dana Transfer	30,97	16,79	54,21	51,72
III. Lain-lain Pendapatan Daerah	1,67	0,25	15,45	479,51
B. BELANJA DAERAH	41,12	14,41	35,04	15,43
I. Belanja Operasi	30,27	11,61	38,37	22,91
Belanja Pegawai	17,32	8,12	46,89	21,92
Belanja Barang dan Jasa	11,47	3,27	28,50	25,41
Belanja Hibah	1,11	0,15	14,14	34,1
Belanja Bantuan Sosial	0,31	0,05	16,57	-8,2
II. Belanja Modal	3,10	0,43	14,04	40,26
III. Belanja Tidak Terduga	0,27	0,08	30,44	456,89
IV. Belanja Transfer	7,47	2,27	30,42	-15,96
Belanja Bagi Hasil	0,79	0,11	14,58	124,44
Belanja Bantuan Keuangan	6,67	2,15	32,31	-18,71
C. SURPLUS/DEFISIT	0,07	5,23	-	625,81
D. PEMBIAYAAN DAERAH	1,36	1,10	90,90	657,04
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,41	1,14	81,48	596,29
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,04	0,04	100,58	122,86
E. SILPA	1,44	6,34	-	631,08

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), diolah

Tetap tingginya kinerja konsumsi pemerintah tercermin pada tingkat belanja APBD dan APBN di Aceh pada triwulan laporan.

Realisasi Belanja APBD pada triwulan II 2026, tercatat mencapai Rp14,41 Triliun atau sebesar 35,04% dari total pagu anggaran. Angka realisasi tersebut meningkat sebesar 15,43% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp12,48 Triliun. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan realisasi Belanja utamanya didorong oleh komponen Belanja Pegawai yang tercatat sebesar Rp8,12T, meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,64T atau tumbuh sebesar 21,92% (yoy), hal ini seiring dengan adanya penyaluran gaji ke-13 ASN di bulan Juni, serta penerimaan ASN baru. Meningkatnya realisasi belanja APBD pada triwulan laporan, juga dapat dikaitkan dengan percepatan realisasi seiring dengan penghapusan syarat salur untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,64T sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102 Tahun 2025. (Tabel 1.1.).

Meningkatnya konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 tercermin dari tingginya pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat di Aceh. Hingga 30 Juni 2026, realisasi belanja APBN di Aceh tercatat sebesar Rp26,11 triliun atau 42,07% dari total pagu anggaran. Nilai tersebut meningkat sebesar 29,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp20,12 triliun (Tabel 1.2.).

Peningkatan realisasi belanja APBN di Aceh didorong oleh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Meningkatnya realisasi belanja APBN di Aceh turut memperkuat peran konsumsi pemerintah sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Kinerja investasi (PMTB) Aceh pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi. PMTB tercatat masih tumbuh tinggi sebesar 10,78% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 10,75% (yoy). Kinerja PMTB tersebut menunjukkan berlanjutnya penguatan aktivitas investasi dan pembangunan di Aceh setelah terdampak oleh bencana hidrometeorologi.

Terakselerasinya kinerja PMTB terutama didorong oleh percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana, baik dari pihak swasta, maupun pemerintah. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan investasi adalah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Aceh, dengan progres fisik yang telah mencapai 61,29% dari total target tahun 2026.

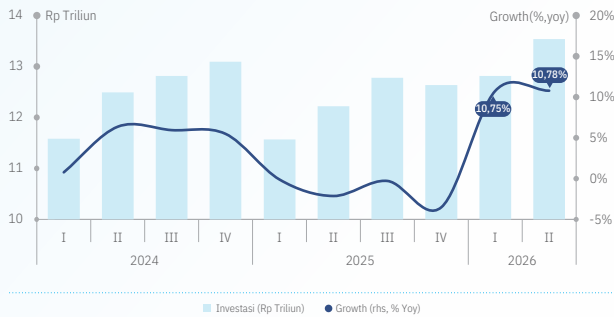
Meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung layanan publik tersebut menjadi indikasi menguatnya investasi, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan laporan.

Tabel 1.2. Realisasi Belanja APBN Triwulan II 2026

REALISASI BELANJA APBN – dalam Triliun Rupiah				
Uraian	Triwulan II 2026			Growth Realisasi (% , yoy)
	Target (Pagu) APBN	Realisasi s.d. 30Juni	% Realisasi	
BELANJA NEGARA	62,07	26,11	42,07	29,74
I. Belanja Pemerintah Pusat	33,48	8,75	26,14	42,51
Belanja Pegawai	9,87	5,55	56,29	25,64
Belanja Barang	12,78	1,97	15,44	42,38
Belanja Modal	10,81	1,21	11,26	304,21
II. Transfer ke Daerah	28,58	17,35	60,72	24,13
Dana Bagi Hasil	0,85	0,58	68,62	74,69
Dana Alokasi Umum	17,05	10,28	60,27	32,77
Dana Transfer Khusus	4,81	2,30	47,84	14,33
DAK Fisik	0,38	0,01	2,69	(46,16)
DAK Non-Fisik	4,42	2,29	51,80	15,02
Dana Otonomi Khusus	4,07	2,99	73,47	131,62
Dana Desa	1,78	1,19	66,87	(53,63)
Dana Insentif Fiskal	-	-	-	-

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), diolah.

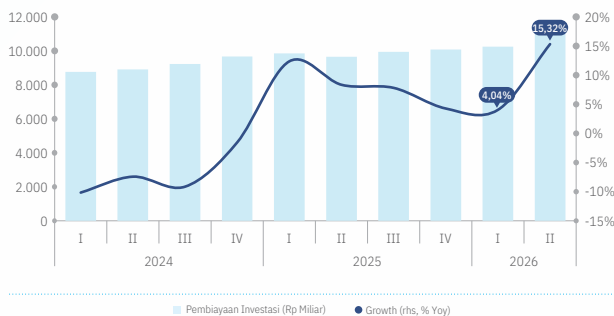
Grafik 1.9. Pertumbuhan PMTB



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Akselerasi kinerja investasi tercermin dari meningkatnya pembiayaan investasi. Secara tahunan, realisasi pertumbuhan pembiayaan investasi tercatat tumbuh sebesar 15,32% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,04% (yoy).

Grafik 1.10. Perkembangan Pembiayaan Investasi

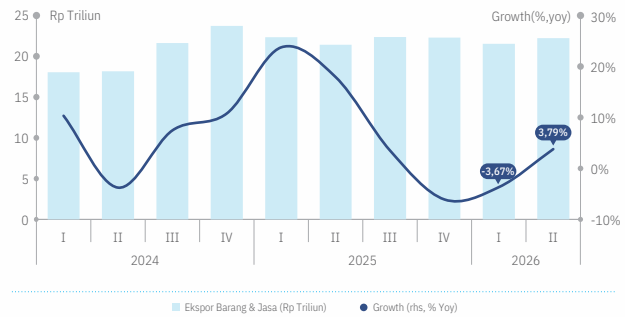


Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Ekspor Barang dan Jasa

Kinerja ekspor barang dan jasa Aceh pada triwulan II 2026 kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya. Ekspor Barang dan Jasa Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 3,79% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,67% (yoy) (Grafik 1.11). Membaiknya kinerja ekspor tersebut sejalan dengan berangsur pulihnya aktivitas ekonomi setelah bencana hidrometeorologi, khususnya pulihnya kinerja ekspor batu bara. Di sisi lain, berangsurnya pemulihan ekspor non-tambang khususnya ekspor komoditas kopi juga turut mendorong kinerja ekspor di triwulan laporan.

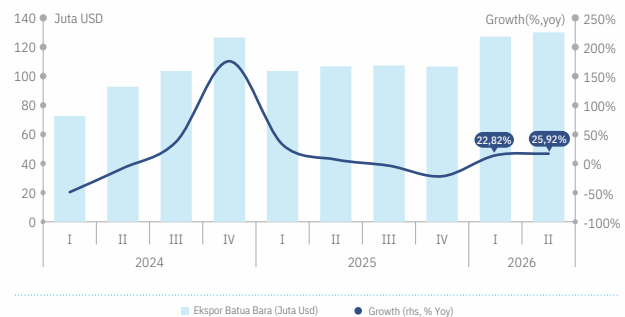
Grafik 1.11. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

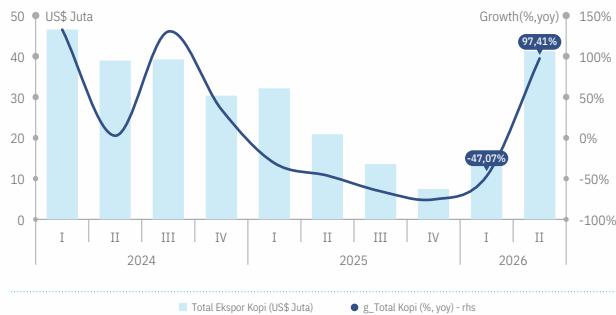
Perbaikan kinerja ekspor Aceh pada triwulan II 2026 utamanya didorong oleh membaiknya kinerja ekspor batu bara, seiring dengan peningkatan kuota produksi batu bara pada RKBA Minerba Aceh. Batu bara memiliki pangsa sebesar 68,91% dari total nilai ekspor Aceh, sehingga perkembangan ekspor komoditas ini memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor secara keseluruhan. Pada triwulan laporan, ekspor batu bara tumbuh sebesar 25,92% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,82% (yoy) (Grafik 1.12). Secara nominal, nilai ekspor batu bara mencapai US\$134,36 juta pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$127,23 juta.

Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Batubara

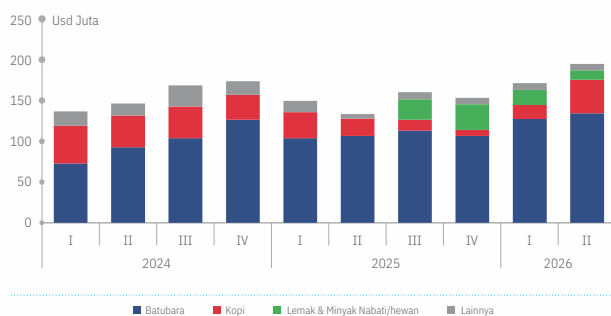


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Kinerja ekspor komoditas kopi menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada Triwulan II 2026. Ekspor kopi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US\$41,27 juta, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US\$17,09 juta, atau meningkat sebesar 97,41% (yoy) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -47,07% (yoy). Peningkatan ini utamanya dapat dikaitkan dengan backloading pemenuhan permintaan ekspor kopi oleh negara mitra yang sempat tertahan, seiring dengan dampak bencana hidrometeorologi yang menyebabkan terhambatnya akses logistik dan kapasitas produksi kopi di Kab. Aceh Tengah dan Gayo Lues (Grafik 1.13).

Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Komoditas Kopi Aceh

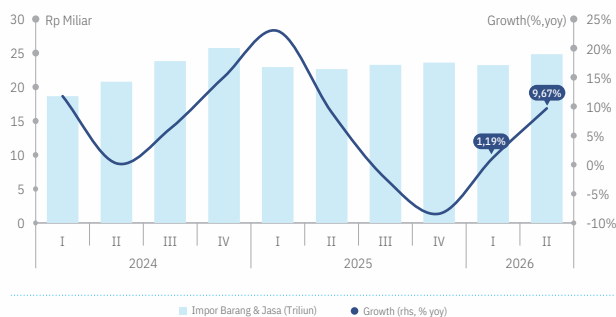
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.14. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Provinsi Aceh

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Impor Barang dan Jasa

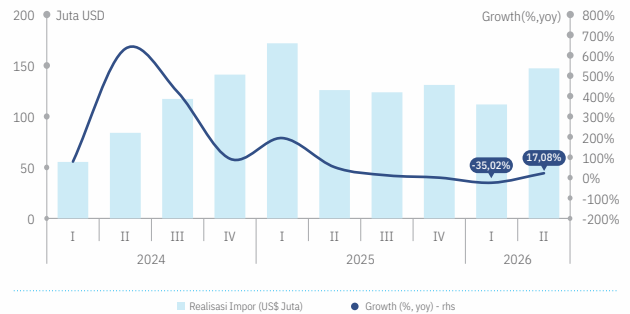
Pertumbuhan impor barang dan jasa meningkat pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2026, impor barang dan jasa tumbuh sebesar 9,67% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,19% (yoy) (Grafik 1.15).

Grafik 1.15. Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Impor Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh impor minyak dan gas (migas). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi impor pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 17,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -35,03% (yoy). Secara nominal, nilai realisasi impor Aceh pada

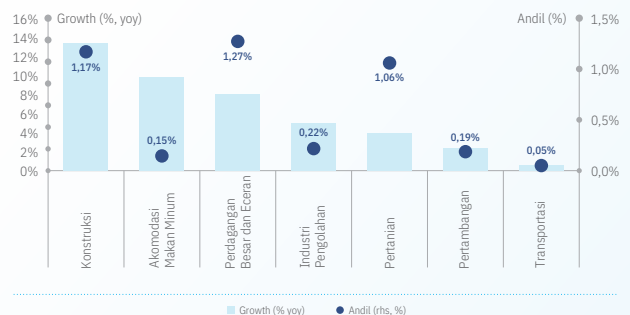
triwulan II 2026 sebesar US\$154,06 juta, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya sebesar US\$116,75 juta (Grafik 1.16). Berdasarkan komoditas, impor Aceh masih didominasi oleh impor minyak dan gas dengan pangsa sebesar 85,99% dari total impor, disusul oleh bahan kimia anorganik (pangsa 9,47%), dan komoditas pupuk (pangsa 1,89%).

Grafik 1.16. Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 didorong oleh membaiknya sejumlah LU utama dengan pangsa besar terhadap PDRB, yaitu LU Perdagangan, LU Konstruksi, dan LU Pertanian. Pada triwulan laporan, LU Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 7,99% (yoy) dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan Aceh sebesar 1,27% (yoy). Hal tersebut turut didukung oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama HBKN Iduladha, perayaan tradisi Meugang, libur sekolah, dan *long-weekend* di bulan April dan Mei. Selain dari itu, LU Konstruksi juga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dengan pertumbuhan sebesar 13,36% (yoy) dan andil pertumbuhan sebesar 1,17% (yoy). Tingginya pertumbuhan sektor konstruksi seiring dengan berlanjutnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Di sisi lain, LU Pertanian tercatat tumbuh sebesar 3,98% (yoy) dan memberikan andil

Grafik 1.17. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan II 2026

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

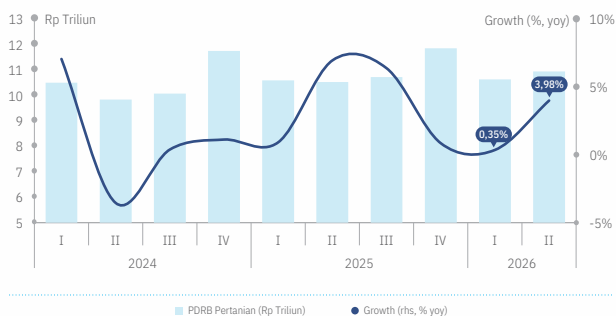
pertumbuhan sebesar 1,06% (yoy). Hal tersebut utamanya dapat dikaitkan oleh meningkatnya permintaan hewan kurban selama perayaan HBKN Iduladha (Grafik 1.17).

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja LU Pertanian pada triwulan II 2026 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 3,98% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 0,35% (yoy) (Grafik 1.18.). Perbaikan ini utamanya dapat dikaitkan dengan peningkatan kinerja sub-sektor peternakan, seiring dengan permintaan komoditas hewan kurban yang lebih tinggi pada HBKN Iduladha.

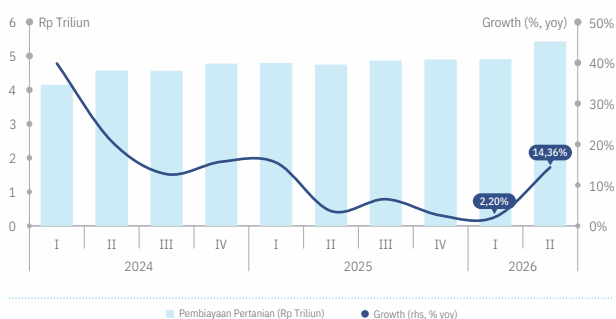
Kendati demikian, kinerja pertumbuhan LU Pertanian pada triwulan laporan masih lebih rendah dibandingkan. Pada triwulan II 2025, LU pertanian tumbuh lebih tinggi yaitu mencapai 3,98% (yoy). Hal ini seiring dengan masih berlanjutnya progres rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana, khususnya lahan pertanian dengan tingkat kerusakan sedang dan berat, yang masih dalam tahapan SID (Survei Investigasi dan Desain).

Grafik 1.18. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.19. Perkembangan Pembiayaan Pertanian

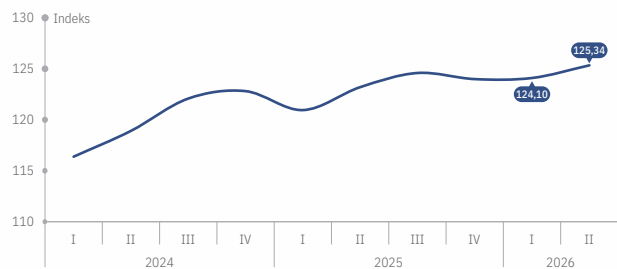


Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Membaiknya pertumbuhan LU Pertanian pada triwulan II 2026 ditopang oleh membaiknya pembiayaan. Pada triwulan laporan, pembiayaan sektor pertanian tercatat sebesar Rp5,43 triliun atau tumbuh sebesar 14,36% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,20% (yoy) (Grafik 1.19).

Perbaikan kinerja LU Pertanian juga terkonfirmasi dari membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP). NTP pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 125,34, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 124,10 (Grafik 1.20.). Peningkatan nilai NTP disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).

Grafik 1.20. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

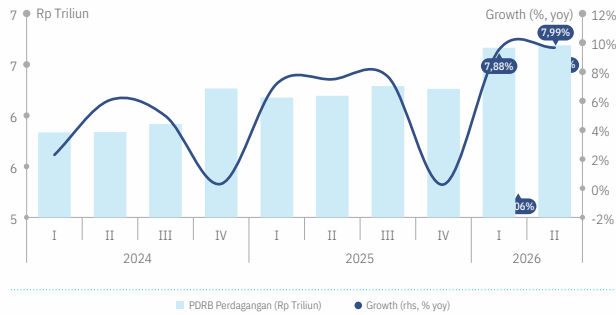


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

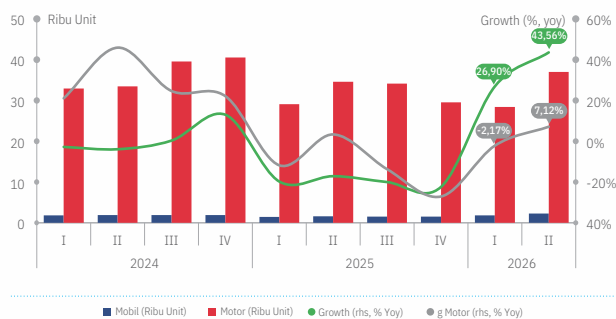
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2026 kembali mengalami peningkatan, sejalan dengan pemulihan aktivitas konsumsi masyarakat selama perayaan HBKN Iduladha dan *long-weekend* di bulan April dan Mei. Pada triwulan II 2026, LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat tumbuh sebesar 7,99% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,88% (yoy) (Grafik 1.21). Meningkatnya kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran utamanya didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat selama perayaan HBKN Iduladha, pemulihan aktivitas konsumsi rumah tangga, serta pulihnya kembali jalur distribusi utama di Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Meningkatnya kinerja LU Perdagangan juga tercermin pada membaiknya pertumbuhan penjualan kendaraan pada triwulan II 2026. Penjualan mobil baru pada triwulan laporan tumbuh sebesar 43,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,90% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, penjualan motor baru juga tumbuh sebesar 7,12% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -2,17% (yoy) (Grafik 1.22).

Grafik 1.21. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan

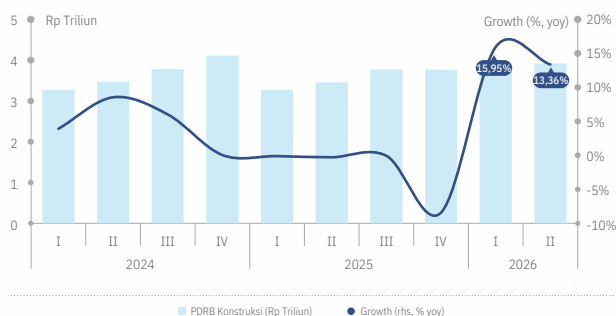
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 1.22. Pertumbuhan Penjualan Kendaraan

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

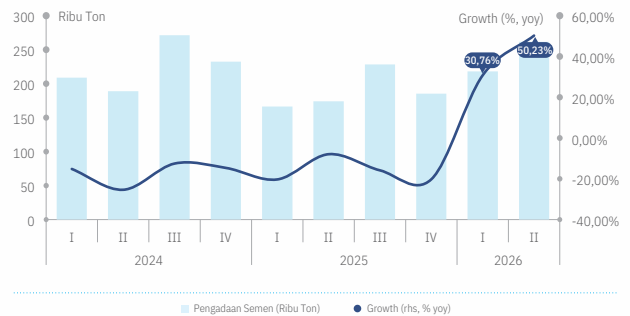
Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tetap tumbuh tinggi, sejalan dengan masih kuatnya kinerja investasi dan progres rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. Pada triwulan II 2026, LU Konstruksi tercatat tumbuh sebesar 13,36% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,94% (yoy) (Grafik 1.23). Kinerja LU Konstruksi yang tetap tinggi utamanya didorong oleh progres rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur daerah terdampak bencana hidrometeorologi pada triwulan laporan, serta pelaksanaan program pemerintah antara lain pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Grafik 1.23. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi

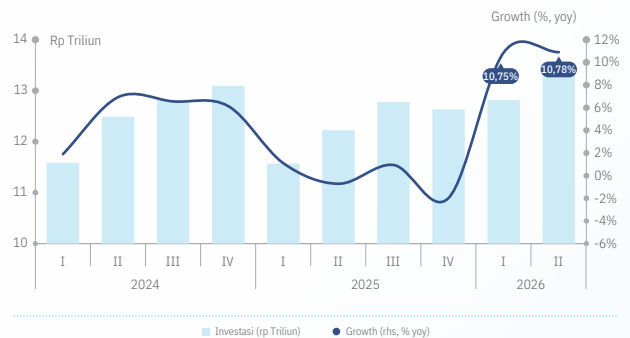
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tetap tingginya kinerja LU Konstruksi tercermin dari meningkatnya pengadaan semen pada triwulan II 2026. Pengadaan semen pada triwulan laporan tercatat sejumlah 261.435 ton atau tumbuh sebesar 50,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 30,76% (yoy) (Grafik 1.24.).

Grafik 1.24. Perkembangan Pengadaan Semen

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Kinerja LU Konstruksi yang tetap tinggi juga sejalan dengan masih kuatnya kinerja investasi di Aceh. Kinerja PMTB Aceh pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 10,78% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,75% (yoy) (Grafik 1.25.).

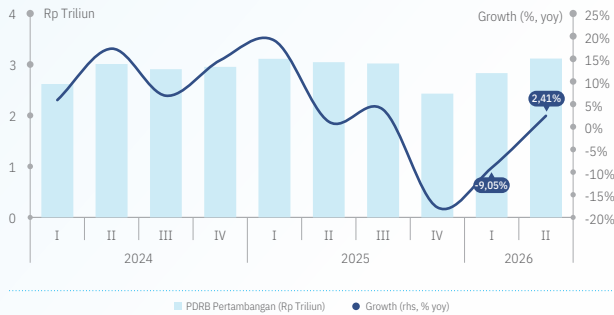
Grafik 1.25. Pertumbuhan PMTB

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertambangan

LU Pertambangan pada triwulan II 2026 kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, LU Pertambangan tercatat tumbuh sebesar 2,41% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi cukup dalam sebesar -9,05% (yoy) (Grafik 1.26.). Perbaikan ini sejalan dengan berlanjutnya peningkatan ekspor batu bara pada triwulan laporan sebesar 25,92% (yoy) (Grafik 1.11). Kendati demikian, pertumbuhan tersebut masih terbatas seiring dengan bertahapnya pemulihan produksi pada subsektor minyak dan gas.

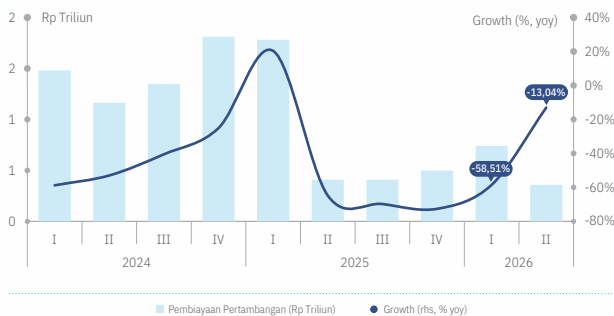
Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja LU Pertambangan ditopang oleh pembiayaan sektor pertambangan yang menunjukkan perbaikan. Pada triwulan II 2026, posisi pembiayaan sektor tambang secara tahunan tercatat terkontraksi sebesar -13,04% (yoy), membaik signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -58,51% (yoy) (Grafik 1.27.).

Grafik 1.27. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan

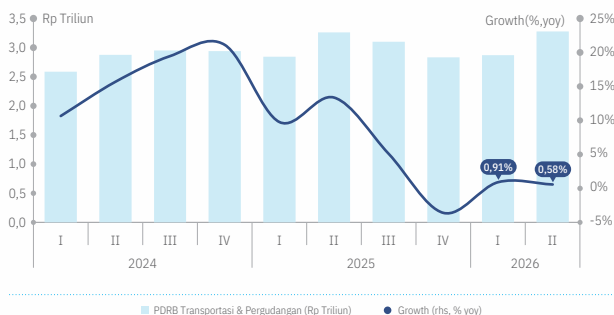


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan II 2026 masih tumbuh terbatas, seiring dengan berangsurnya pemulihan jalur logistik utama di Aceh pascabencana hidrometeorologi. Pada triwulan II 2026, LU Transportasi dan

Grafik 1.28. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

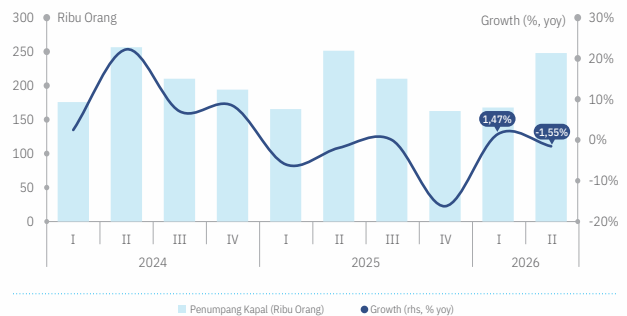


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pergudangan tercatat tumbuh sebesar 0,58% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,91% (yoy) (Grafik 1.28).

Turunnya kinerja LU Transportasi tercermin pada jumlah penumpang angkutan laut yang menurun pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2026, jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Ulee Lheue terkontraksi sebesar -1,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,47% (yoy). (Grafik 1.29).

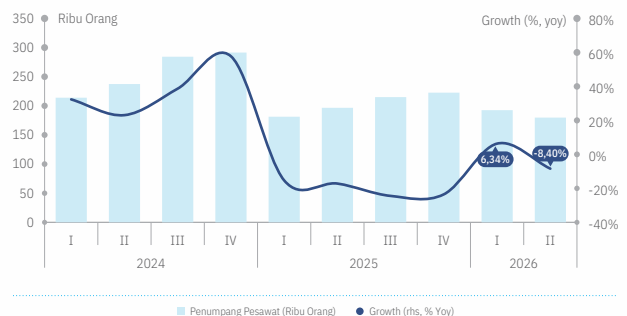
Grafik 1.29. Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Di sisi lain, penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang pesawat. Pada triwulan II 2026, jumlah penumpang pesawat (berangkat dan datang) di Bandara Sultan Iskandar Muda mencapai 180 ribu orang atau terkontraksi sebesar -8,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,34% (yoy) (Grafik 1.30).

Grafik 1.30. Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda



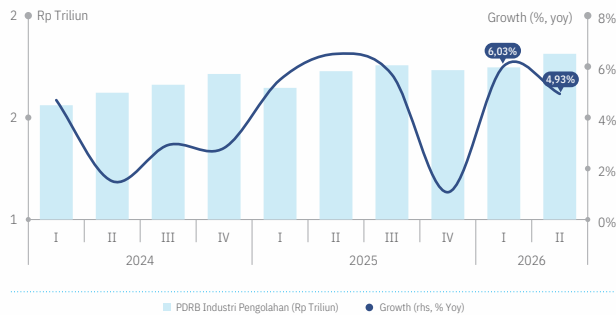
Sumber: Angkasa Pura II, diolah

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 4,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy) (Grafik 1.31.). Kendati demikian, LU Industri Pengolahan tetap tumbuh positif sejalan

dengan pulihnya kembali distribusi bahan baku dan bahan antara untuk industri pengolahan, serta normalisasi pasokan listrik dan bahan bakar pascabencana hidrometeorologi, baik pada industri besar maupun industri kecil menengah.

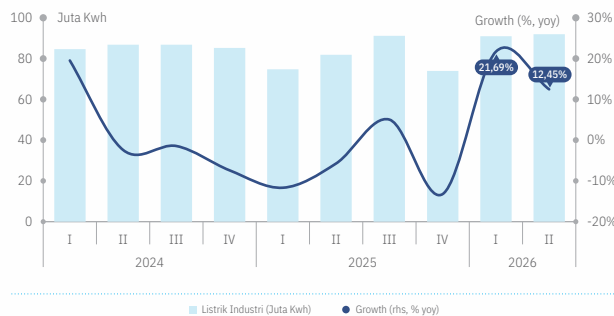
Grafik 1.31. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

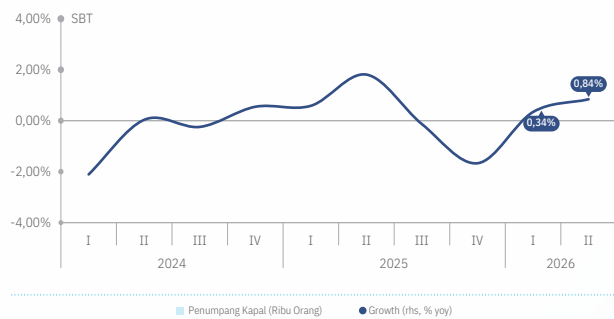
Termoderasinya kinerja LU Industri Pengolahan juga tercermin dari melambatnya pertumbuhan konsumsi listrik industri. Konsumsi listrik industri pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 12,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,69% (yoy) (Grafik 1.32).

Grafik 1.32. Perkembangan Konsumsi Listrik Industri



Sumber: Perusahaan Listrik Negara, diolah

Grafik 1.33. Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan



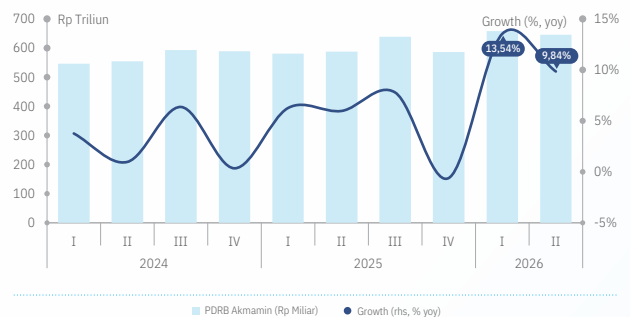
Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain, pertumbuhan sektor industri yang positif sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 0,84%, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,34% (Grafik 1.33.).

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tetap tumbuh tinggi pada triwulan laporan. Pada triwulan II 2026, angka pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman tumbuh sebesar 9,84% (yoy). Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,54% (yoy) (Grafik 1.34.). Kinerja LU Akmamin yang tetap tinggi sejalan dengan masih berlanjutnya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penambahan sejumlah SPPG di Aceh.

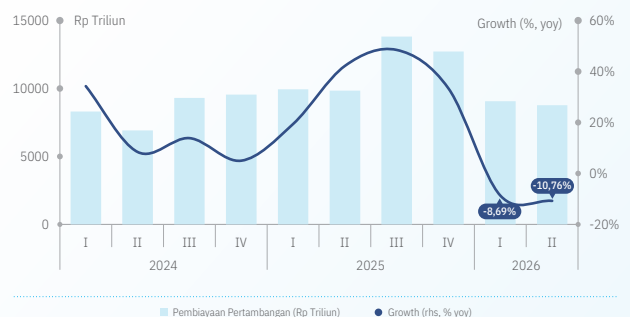
Grafik 1.34. Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada triwulan II 2026 tercatat mencapai 8.781 wisatawan, atau terkontraksi sebesar 10,76% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,69% (yoy) (Grafik 1.35.).

Grafik 1.35. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

BOKS 1

Perkembangan Optimasi Lahan Pertanian Pasca Bencana Hidrometeorologi di Aceh

Program rehabilitasi lahan sawah pascabencana merupakan salah satu program pemulihan dengan cakupan terluas di Aceh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, posisi 18 Agustus 2026, program ini menargetkan penanganan 40.832 ha lahan sawah di 17 kabupaten/kota, yang terdiri atas 27.071 ha melalui skema Optimasi Lahan (OPLA) Bencana dan 13.781 ha melalui skema Rehabilitasi Bencana. Cakupan terbesar berada di wilayah pesisir timur, yaitu Kabupaten Aceh Utara (11.782 ha), Aceh Timur (8.585 ha), Aceh Tamiang (4.173 ha), dan Bireuen (3.820 ha), yang secara bersama mencakup 69,5% dari total target provinsi dan merupakan sentra produksi padi utama Aceh.

Pelaksanaan program menunjukkan kemajuan pada seluruh tahapan. Penyusunan dokumen rencana teknis (DRT) telah terealisasi seluas 28.171 ha atau 69,0% dari target, dan seluruhnya telah berlanjut ke tahap kontrak konstruksi seluas 28.168 ha. Dari luas tersebut, pekerjaan konstruksi telah rampung pada 12.007 ha atau 42,6% dari luas terkontrak. Kemajuan juga telah masuk ke tahap budi daya, dengan olah lahan seluas 3.661 ha (9,0% dari target) dan tanam seluas 373 ha (0,9%). Capaian tersebut menunjukkan rangkaian pemulihan lahan telah berjalan secara berurutan, mulai dari perencanaan, konstruksi, olah lahan, hingga tanam.

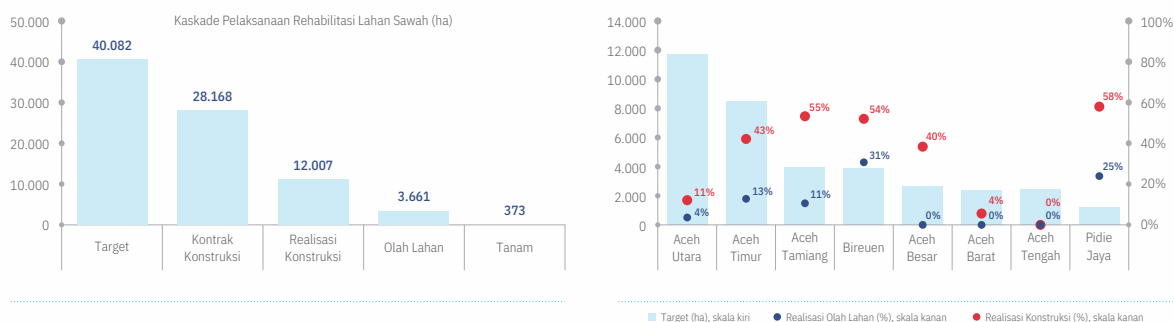
Sejumlah daerah mencatat progres yang cukup baik. Di antara kabupaten dengan target terbesar, realisasi konstruksi tertinggi tercatat di Kabupaten Pidie Jaya (58,3%), Aceh Tamiang (55,0%), dan Bireuen (53,7%),

diikuti Aceh Timur (43,4%) dan Aceh Besar (39,8%). Kemajuan pada tahap budi daya juga mulai terlihat, dengan olah lahan tertinggi di Bireuen (31,3% dari target) dan Pidie Jaya (24,5%), serta kegiatan tanam yang telah berjalan di Aceh Utara (182 ha), Bireuen (104 ha), dan Aceh Tamiang (87 ha). Daerah dengan target luas seperti Aceh Utara dan Aceh Timur masih memiliki pekerjaan terkontrak yang sedang berjalan, sehingga berpotensi menambah capaian pada triwulan berikutnya.

Perkembangan tersebut memberikan dukungan pada dua lapangan usaha (LU) utama. Pada LU Konstruksi, pekerjaan rehabilitasi yang sedang berjalan seluas 16.161 ha berpotensi menopang kinerja pada triwulan III dan IV 2026. Pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, penyelesaian konstruksi yang terus berlanjut akan memperluas lahan siap tanam, sehingga pertambahan luas tanam dan luas panen padi diperkirakan mulai terlihat pada musim tanam berikutnya dan semakin nyata pada 2027.

Ke depan, percepatan penyelesaian program menjadi penting untuk mempercepat pemulihan pasokan pangan di Aceh. Saat ini terdapat 16.161 ha lahan terkontrak yang sedang dalam penyelesaian, dengan potensi percepatan terbesar di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Aceh Barat yang mencakup 81,7% dari sisa pekerjaan tersebut. Selain itu, masih tersedia ruang penyelesaian kontrak atas 12.664 ha lahan. Percepatan pada kedua area tersebut, disertai penyesuaian dengan kalender musim tanam dan kesiapan sarana produksi, akan mempercepat pertambahan luas tanam dan luas panen.

Grafik Kaskade Pelaksanaan Program dan Progres Fisik Rehabilitasi Lahan Sawah Provinsi Aceh



Sumber: Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, posisi 18 Agustus 2026, diolah

BOKS 1

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus mendukung sinergi antarinstansi guna mempercepat pemulihan produksi padi dan menjaga kestabilan pasokan pangan di Aceh.

Catatan: target OPLA Bencana dan Rehabilitasi Bencana berjumlah 40.852 ha, sedangkan kolom target agregat dokumen sumber tercatat 40.832 ha (selisih 20 ha merupakan target Kabupaten Nagan Raya). Perhitungan pada boks ini menggunakan basis 40.832 ha.

02.

Perkembangan Inflasi Daerah



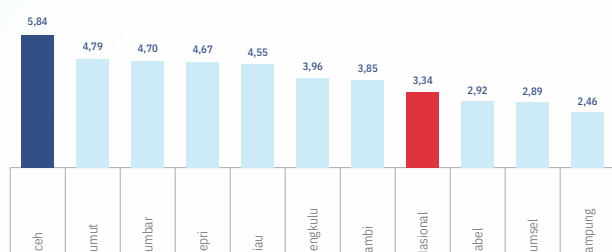


Perkembangan pascabencana dan berlanjutnya ketegangan geopolitik global berdampak pada masih tingginya inflasi Aceh. Pada triwulan II 2026, inflasi Aceh tercatat 5,84% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 5,31% (yoy). Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bensin akibat penyesuaian BBM nonsubsidi, penurunan pasokan pangan dari siklus tanam cabai dan beras serta anomali cuaca, efek pascabencana yang memicu second round effect pada nasi dengan lauk, dan lonjakan harga emas perhiasan akibat ketegangan geopolitik global. Meskipun demikian, laju inflasi tersebut berhasil tertahan oleh normalisasi konsumsi pasca-HBKN Iduladha dan Meugang serta pulihnya konektivitas logistik.

2.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Aceh pada triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 5,84% (yoy) pada triwulan II tahun 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang mencapai 5,31% (yoy) dan berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,34% (yoy). Jika dibandingkan dengan nasional, posisi inflasi Aceh masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Papua Pegunungan (7,84% yoy) dan Papua Barat (6,99% yoy). Namun jika dibandingkan dengan provinsi di wilayah Sumatera lainnya, Aceh menjadi provinsi dengan laju inflasi tertinggi.

Grafik 2.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2026 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tabel 2.1. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan II 2026

Inflasi		Deflasi	
Komoditas	Andil (yoy%)	Komoditas	Andil (yoy%)
Nasi Dengan Lauk	0,54	Tarif Air Minum PAM	-0,10
Emas Perhiasan	0,53	Baju Muslim Wanita	-0,06
Beras	0,51	Sekolah Menengah Atas	-0,03
Cabai Merah	0,33	Ikan Biji Nangka/ Ikan Kuniran	-0,03
Bensin	0,24	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi pada periode laporan utamanya bersumber dari komoditas bensin karena peningkatan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) nonsubsidi pada 10 Juni 2026. Di sektor pangan, inflasi didorong oleh berkurangnya pasokan seiring mulai masuknya musim tanam cabai merah di sentra produksi Aceh Tengah, periode tanam gadu komoditas beras, serta anomali cuaca yang menghambat panen bawang merah dan kegiatan melaut nelayan. Selain itu, lonjakan harga terjadi akibat *low base effect* periode sebelum bencana hidrometeorologi akhir 2025. Tingginya harga bahan baku ini memicu *second-round effect* pada komoditas turunannya (nasi dengan lauk).

Sementara itu dari sisi eksternal, ketegangan geopolitik global mendorong pergeseran preferensi investor menuju *safe haven asset*, yang berdampak langsung pada eskalasi harga emas perhiasan di pasar domestik.

Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan karena normalisasi konsumsi masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan tradisi Meugang dan pemulihan konektivitas jalur logistik ke sentra produksi.

2.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Perkembangan inflasi pada triwulan II 2026 secara agregat didorong oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok tersebut mencatatkan andil tertinggi yaitu sebesar 2,95%. Kenaikan tingkat harga tersebut turut disumbangkan oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan kontribusi inflasi mencapai 1,14%. Selain itu, dorongan inflasi lebih lanjut juga bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok transportasi, yang masing-masing memberikan sumbangan andil sebesar 0,62% dan 0,53%.

Tabel 2.2. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Barang dan Jasa	Tw I 2026		Tw II 2026	
	Inflasi (%yoy)	Andil (%yoy)	Inflasi (%yoy)	Andil (%yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,36	2,03	7,87	2,95
Pakaian dan Alas Kaki	0,90	0,05	0,02	-0
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	7,16	1,07	2,05	0,32
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,36	0,05	3,28	0,12
Kesehatan	2,40	0,04	1,68	0,03
Transportasi	1,29	0,13	5,24	0,53
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,75	0,03	2,93	0,11
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,97	0,01	2,89	0,03
Pendidikan	-0,11	-0	-0,19	-0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	9,12	0,98	10,74	1,14
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,78	0,92	10,41	0,62
Inflasi Umum	5,31		5,84	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan rincian pembentuknya, tekanan inflasi tertinggi bersumber dari kenaikan harga nasi dengan lauk, emas perhiasan, beras, cabai merah, dan bensin. Tingginya realisasi inflasi tahunan secara umum disebabkan oleh belum pulihnya produksi dan jalur distribusi pascabencana hidrometeorologi.

Berdasarkan kelompok penyumbangnya, tekanan utama bersumber dari kelompok pangan, tecermin dari kenaikan harga komoditas strategis seperti beras dan cabai merah. Lebih lanjut, kenaikan harga di tingkat hulu memicu *second-round effect* pada komoditas turunannya, seperti nasi dengan lauk. Kondisi ini pada akhirnya membentuk harga persisten bertahan pada level tinggi mengikuti tren biaya bahan baku di tingkat konsumen.

Di sisi lain, tekanan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan global. Eskalasi ketegangan geopolitik sejak akhir 2025 telah memicu pergeseran preferensi portofolio investor global menuju *safe haven asset*. Pergeseran ini secara langsung mendongkrak valuasi emas dunia, yang berdampak terhadap lonjakan harga komoditas emas perhiasan di pasar domestik. Di sisi lain, terdapat komoditas yang mengalami deflasi yaitu tarif air minum PAM, baju muslim wanita, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta ikan biji nangka/kuniran.

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami peningkatan disebabkan oleh terbatasnya pasokan beberapa komoditas pangan. Inflasi kelompok ini mencapai 7,87% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,36% (yoy). Secara agregat, kelompok ini memberikan andil yang dominan sebesar 2,95% terhadap inflasi umum Provinsi Aceh.

Peningkatan harga terutama bersumber dari komoditas pangan strategis yaitu beras. Pada Triwulan II 2026, beras menjadi kontributor utama penyumbang andil yaitu sebesar 0,51%. Kenaikan harga beras yang terjadi secara merata di kelima Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh didorong oleh terbatasnya pasokan seiring masih berlangsungnya masa tanam gadu di sentra produksi utama (Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Besar). Panen diperkirakan baru akan dimulai pada akhir Agustus 2026.

Selain itu, komoditas hortikultura, perikanan, dan rokok turut memberikan dorongan inflasi. Komoditas cabai merah turut menyumbang andil inflasi sebesar 0,33% akibat masuknya musim tanam di sentra produksi Aceh Tengah yang diperkirakan baru memanen hasilnya pada bulan Oktober 2026. Dari sektor perikanan, gelombang laut kategori sedang hingga tinggi membatasi aktivitas melaut nelayan, sehingga menghambat pasokan dan mendorong inflasi komoditas ikan tongkol/ambu-ambu dengan andil 0,16%. Di samping itu, komoditas tomat dan minyak goreng masing-masing turut memberikan andil inflasi sebesar 0,19%. Dari sisi produk olahan tembakau, beban produksi turut memberikan dorongan inflasi yang tecermin dari andil Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,23% dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 0,14%.

Tabel 2.3. Inflasi Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Inflasi 7,87% (yoy)		Andil 2,95%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Beras	0,51	Ikan Biji Nangka/ Ikan Kuniran	-0,03
Cabai Merah	0,33	Kelapa	-0,02
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,23	Telur Ayam Ras	-0,02
Tomat	0,19	Pucuk Labu	-0,01
Minyak Goreng	0,19	Kue Bolu/Tart	-0,01
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	0,16	Kangkung	-0,01
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,14	Salak	-0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Laju inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki di Provinsi Aceh bergerak pada level yang relatif stabil. Kelompok pengeluaran ini mencatatkan tingkat inflasi tahunan yang sangat landai sebesar 0,02% (yoy), sehingga secara keseluruhan tidak memberikan andil yang signifikan terhadap pembentukan inflasi umum. Tekanan inflasi pada kelompok ini hanya didorong oleh kenaikan indeks harga pada subkelompok alas kaki yang tercatat sebesar 0,73%. Meskipun demikian, dorongan tekanan tersebut berhasil ditahan oleh penurunan harga pada subkelompok pakaian yang mencatatkan deflasi sebesar 0,13%.

Tabel 2.4. Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Inflasi 0,2% (yoy)		Andil 0,00%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Subkelompok Alas Kaki	0,73	Subkelompok Pakaian	-0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Masih terbatasnya pasokan bahan bakar rumah tangga dan meningkatnya permintaan untuk perbaikan rumah pascabencana mendorong inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok komoditas ini tangga mencatatkan inflasi sebesar 2,05% (yoy) dan menyumbang andil sebesar 0,32% terhadap inflasi umum. Tekanan harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh komponen energi rumah tangga, khususnya komoditas bahan bakar rumah tangga yang memberikan kontribusi inflasi mencapai 0,20% (yoy). Kenaikan harga tersebut dipicu oleh terbatasnya stok LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) bersubsidi di tingkat pangkalan resmi, yang kemudian memaksa pengecer untuk menaikkan harga jual akibat kekurangan pasokan.

Lebih lanjut, inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh peningkatan biaya jasa pemeliharaan dan harga material bangunan seiring dengan meningkatnya permintaan untuk perbaikan rumah pascabencana. Hal ini tecermin dari andil inflasi pada upah tukang bukan mandor sebesar 0,05%, serta komoditas bahan bangunan seperti semen (0,04%), batu bata/batu tela (0,03%), pasir (0,03%), besi beton (0,02%), dan seng (0,02%). Meskipun demikian, laju inflasi agregat pada kelompok ini berhasil tertahan oleh penurunan biaya pada komponen utilitas air yaitu tarif air minum PAM yang mencatatkan deflasi sebesar -0,10%.

Tabel 2.5. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

Inflasi 2,05% (yoy)		Andil 0,32%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Bahan Bakar RT	0,20	Tarif Air Minum PAM	-0,10
Tukang Bukan Mandor	0,05		
Semen	0,04		
Batu Bata/Batu Tela	0,03		
Pasir	0,03		
Besi Beton	0,02		
Seng	0,02		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencatatkan tingkat inflasi sebesar 3,28% (yoy), dengan kontribusi andil terhadap inflasi umum sebesar 0,12%. Peningkatan harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh komoditas kulkas/lemari es yang mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,02%. Kenaikan tersebut turut diikuti oleh pergerakan harga pada sejumlah komoditas perlengkapan rumah tangga lainnya, meliputi ember, mesin cuci, lemari plastik, *spring bed*, panci, dan kasur, yang masing-masing

Tabel 2.6. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

Inflasi 3,28% (yoy)		Andil 0,12%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Kulkas/Lemari Es	0,02	Detergen Cair	-0,01
Ember	0,01		
Mesin Cuci	0,01		
Lemari Plastik	0,01		
Spring Bed	0,01		
Panci	0,01		
Kasur	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

menyumbang andil inflasi sebesar 0,01%. Di sisi lain, laju inflasi agregat pada kelompok ini berhasil ditahan oleh penurunan harga pada komoditas detergen cair yang menyumbang andil deflasi sebesar -0,01%.

Kel. Kesehatan

Laju inflasi pada kelompok kesehatan di Provinsi Aceh bergerak pada level yang relatif stabil dan terkendali. Kelompok pengeluaran ini mencatatkan tingkat inflasi tahunan sebesar 1,68% (yoy), sehingga secara keseluruhan tidak memberikan andil yang signifikan terhadap pembentukan inflasi umum, yakni hanya menyumbang andil sebesar 0,03%. Tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan indeks harga pada perawatan medis dan suplemen, di mana komoditas vitamin dan tarif *check up* menjadi penyumbang utama dengan masing-masing mencatatkan andil inflasi sebesar 0,01%.

Tabel 2.7. Inflasi Kel. Kesehatan

Inflasi 1,68% (yoy)		Andil 0,03%	
Penyumbang Inflasi			
Komoditas	Andil (%)		
Vitamin	0,01		
Tarif Check Up	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Transportasi

Kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara menjadi pendorong inflasi kelompok transportasi. Pada triwulan II 2026, kelompok transportasi mencatatkan tingkat inflasi yang cukup signifikan sebesar 5,24% (yoy), dengan kontribusi andil terhadap pembentukan inflasi umum mencapai 0,53%. Tekanan harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh komponen bahan bakar dan operasional angkutan, khususnya komoditas bensin yang menjadi pendorong utama dengan andil sebesar 0,24%. Kenaikan harga bensin tersebut sejalan dengan kebijakan Pertamina yang melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax sebesar 32% pada 10 Juni 2026

Tabel 2.8. Inflasi Kel. Transportasi

Inflasi 5,24% (yoy)		Andil 0,53%	
Penyumbang Inflasi			
Komoditas	Andil (%)		
Bensin	0,24		
Angkutan Udara	0,11		
Mobil	0,06		
Pemeliharaan/Service	0,05		
Sepeda Motor	0,02		
Pelumas/Oli Mesin	0,01		
Angkutan Antar Kota	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

sebagai respons atas tren kenaikan harga minyak global. Selain itu, tekanan inflasi turut diperberat oleh kenaikan tarif angkutan udara yang menyumbang andil sebesar 0,11%. Dari sisi kepemilikan dan perawatan kendaraan, komoditas pembelian mobil memberikan andil inflasi sebesar 0,06%, diikuti oleh biaya pemeliharaan/servis (0,05%) dan sepeda motor (0,02%). Lebih lanjut, harga pelumas/oli mesin serta tarif angkutan antarkota juga menambah tekanan inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,01%.

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatatkan tingkat inflasi sebesar 2,93% (yoy), dengan kontribusi andil terhadap pembentukan inflasi umum sebesar 0,11%. Tekanan inflasi pada kelompok ini secara spesifik didorong oleh kenaikan harga pada perangkat keras telekomunikasi dan komputasi. Jika dilihat lebih detail, komoditas telepon seluler menjadi pendorong utama dengan sumbangan andil inflasi mencapai 0,07%, diikuti oleh perangkat *laptop/notebook* yang turut menambah tekanan harga dengan andil sebesar 0,03%.

Tabel 2.9. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Inflasi 2,93% (yoy)		Andil 0,11%
Penyumbang Inflasi		
Komoditas	Andil (%)	
Telepon Seluler	0,07	
Laptop/Notebook	0,03	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mencatatkan tingkat inflasi sebesar 2,89% (yoy). Secara keseluruhan, pergerakan harga pada kelompok pengeluaran ini memberikan andil yang relatif kecil terhadap pembentukan inflasi umum, yakni hanya sebesar 0,03%. Tekanan inflasi pada kelompok ini didorong secara merata oleh kenaikan harga pada komponen hiburan dan perlengkapan rekreasi. Secara lebih detail, komoditas mainan anak dan tarif layanan rekreasi menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini, di mana masing-masing komoditas tersebut mencatatkan besaran andil yang identik, yaitu sebesar 0,01%.

Tabel 2.10. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Inflasi 2,89% (yoy)		Andil 0,03%
Penyumbang Inflasi		
Komoditas	Andil (%)	
Mainan anak	0,01	
Rekreasi	0,01	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Pendidikan

Kelompok pendidikan menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang mencatatkan deflasi secara agregat sebesar 0,19% (yoy). Realisasi ini menjadikan kelompok pendidikan sebagai faktor penahan laju inflasi umum dengan andil sebesar -0,01%. Penurunan indeks harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh turunnya biaya pendidikan pada tingkat menengah, di mana Sekolah Menengah Atas (SMA) menyumbang andil deflasi sebesar 0,03% dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 0,02%. Penurunan biaya pada tingkat menengah ini secara efektif mampu meredam tekanan dari kenaikan biaya pendidikan pada tingkat dasar, yang tecermin dari naiknya biaya Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sumbangan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03% dan 0,02%.

Tabel 2.11. Inflasi Kel. Pendidikan

Inflasi -0,19% (yoy)		Andil -0,1%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Sekolah Dasar	0,03	Sekolah Menengah Atas	-0,03
Taman Kanak Kanak	0,02	Sekolah Menengah Pertama	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tekanan inflasi tahunan tertinggi secara persentase tercatat pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Inflasi pada kelompok ini melonjak hingga 10,74% (yoy). Kenaikan harga pada kelompok ini memberikan andil yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,14% terhadap inflasi umum. Lonjakan harga didorong oleh peningkatan harga pada sektor makanan jadi siap saji. Komoditas nasi dengan lauk menjadi pendorong utama dengan sumbangan andil yang masif mencapai 0,54%. Tekanan harga pada komoditas ini merupakan *second-round effect* dari tingginya harga komoditas pangan di tingkat hulu. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu harga

Tabel 2.12. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi 10,74% (yoy)		Andil 1,13%
Penyumbang Inflasi		
Komoditas	Andil (%)	
Nasi Dengan Lauk	0,54	
Mie	0,09	
Sayur Olah	0,08	
Bakso Siap Santap	0,08	
Ketupat / Lontong Sayur	0,08	
Ayam Goreng	0,04	
Sate	0,03	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

persisten bertahan pada level tinggi menyesuaikan dengan tren biaya bahan baku.

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, perkembangan harga secara tahunan (yoy) menunjukkan tingkat inflasi yang cukup tinggi, yakni mencapai 10,41%. Secara keseluruhan, pergerakan pada kelompok ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan inflasi umum, yaitu dengan total andil tercatat sebesar 0,62%.

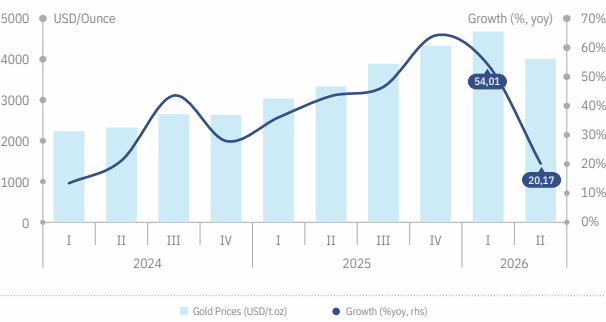
Tekanan inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh pergerakan harga komoditas emas perhiasan, yang tercatat sebagai penyumbang utama dengan andil mencapai 0,53%. Tren kenaikan harga pada komoditas ini sejalan dengan melonjaknya harga emas global akibat eskalasi tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ketidakpastian tersebut memicu pergeseran preferensi investor yang mengalihkan portofolio asetnya pada instrumen safe haven. Rata-rata harga emas dunia pada triwulan I 2026 telah menyentuh level 4.007,7 USD/t.oz. Level harga tersebut mencatatkan lonjakan yang sangat signifikan, yakni tumbuh sebesar 20,17% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 3.3).

Tabel 2.13. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi 10,41% (yoy)		Andil 0,62%	
Penyumbang Inflasi		Penyumbang Deflasi	
Komoditas	Andil (%)	Komoditas	Andil (%)
Emas Perhiasan	0,53	Parfum	-0,01
Shampo	0,01		
Tarif Gunting Rambut Pria	0,01		
Minyak Rambut	0,01		
Pasta Gigi	0,01		
Sabun Mandi	0,01		
Deodorant	0,01		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 2.2. Perkembangan Harga Emas Dunia



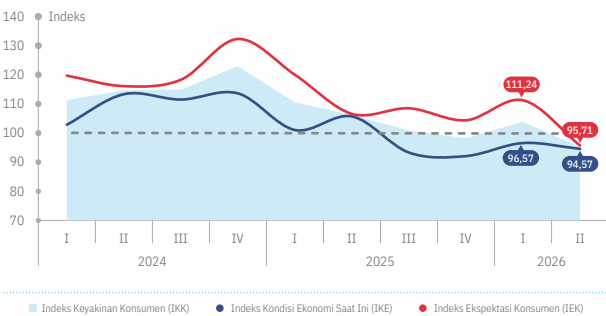
Sumber: Bloomberg, diolah

Survei Konsumen

Dinamika ekonomi yang terjadi pada triwulan II 2026 turut memberikan tekanan terhadap tingkat keyakinan dan ekspektasi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa indikator konsumen telah bergeser dan kini tertahan di zona pesimis (di bawah indeks 100). Secara spesifik, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masing-masing tercatat terkontraksi menjadi 95,14 dan 95,71.

Kedua indikator tersebut mengalami penurunan yang cukup dalam jika dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang masih berada di zona optimis (IKK 103,90 dan IEK 111,24). Penurunan ini mencerminkan tertahannya ekspektasi masyarakat terhadap prospek perekonomian ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mencatatkan pelemahan menjadi 94,57 dari sebelumnya 96,57. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap perekonomian daerah saat ini, baik dari sisi ketersediaan lapangan kerja maupun penghasilan, sedang mengalami tekanan dan cenderung lebih pesimis dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 2.4).

Grafik 2.3. Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

2.3. Tracking Inflasi Triwulan III 2026 dan Inflasi 2026

Inflasi Triwulan III 2026

Inflasi Provinsi Aceh pada bulan Juli 2026 tercatat sebesar 0,24% (mtm), lebih rendah dibandingkan realisasi bulan Juni. Tekanan inflasi pada periode laporan didorong oleh terbatasnya pasokan beras seiring masih berlangsungnya masa tanam gadu di wilayah sentra produksi utama, yaitu Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Besar. Panen gadu diperkirakan baru dimulai pada bulan September, sehingga kenaikan harga beras terjadi di kelima wilayah IHK. Peningkatan harga tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 7,02% dengan andil 0,41%.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit akibat belum masuknya masa panen di Kabupaten Aceh Tengah (pemasok 84,67% cabai rawit lokal Aceh). Panen diperkirakan baru terjadi pada September–Oktober 2026. Selain komoditas pangan utama, harga tomat turut meningkat akibat tingginya permintaan di tengah kondisi pasokan yang relatif tetap.

Sementara itu, dari kelompok transportasi, penyesuaian tarif Pertamina per 10 Juni 2026 memberikan dampak lanjutan yang menyebabkan rata-rata harga bensin pada bulan Juli tetap lebih tinggi dibandingkan bulan Juni. Lebih lanjut, tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan komoditas semen karena meningkatnya permintaan untuk rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian tetap (hunta).

Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh masuknya musim panen komoditas bawang merah dan menurunnya harga emas perhiasan. Pasokan bawang merah mengalami peningkatan seiring masuknya masa panen di Kabupaten Pidie, yang merupakan sentra produksi utama dengan porsi 72,19% terhadap total pasokan lokal. Sementara itu, dari sisi eksternal, harga emas global tercatat turun sebesar 25,14% per 24 Juli 2026 sejak mencapai *all-time high* pada 28 Januari 2026. Penurunan harga ini didorong oleh bergesernya preferensi investor global menuju aset dolar AS. Pergeseran tersebut dipicu oleh *expected inflation* akibat fluktuasi harga energi global, yang mendorong pelaku pasar untuk merealokasikan aset portofolio mereka.

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan III 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat risiko kenaikan harga yang bersumber dari pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan gejolak harga energi global. Kondisi eksternal tersebut memicu kenaikan harga komoditas energi, sehingga memberikan tekanan inflasi pada kelompok transportasi dan bahan bakar rumah tangga. Di sisi lain, terdapat fenomena musim kemarau panjang yang mendorong lonjakan harga pada kelompok pangan. Tekanan pada kelompok pangan ini juga berasal dari kelangkaan bahan bakar solar yang berdampak pada meningkatnya biaya logistik. Sementara itu, tekanan inflasi pada komoditas nasi dengan lauk diperkirakan masih berlanjut karena tingginya biaya bahan baku dan operasional. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan lonjakan permintaan material bahan bangunan seiring masuknya fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di wilayah Aceh.

Inflasi Keseluruhan Tahun 2026

Secara keseluruhan untuk tahun 2026, inflasi Provinsi Aceh diproyeksikan tetap terkendali dan bergerak di sekitar rentang sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Terjaganya laju inflasi ini utamanya ditopang oleh berangsur pulihnya kapasitas

produksi dan perbaikan jalur distribusi pascabencana. Kondisi tersebut tercermin dari akselerasi pemulihan infrastruktur logistik, normalisasi kegiatan operasional di wilayah sentra produksi, serta berjalannya rehabilitasi dan rekonstruksi pada lahan sawah, area pertanian, dan tambak. Meskipun demikian, sinergi langkah antisipatif tetap diperlukan untuk merespons berbagai risiko domestik maupun dinamika ketidakpastian global guna memastikan stabilitas harga hingga penghujung tahun.

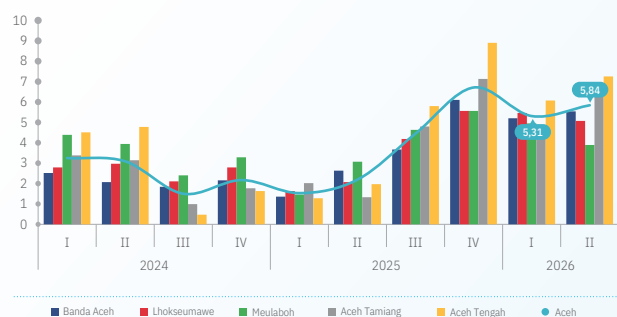
Dengan demikian, penguatan sinergi lintas instansi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh menjadi sangat krusial untuk terus ditingkatkan. Fokus intervensi perlu diarahkan pada upaya stabilisasi harga kelompok pangan, khususnya untuk memitigasi *scarring effect* akibat gangguan produksi dan terhambatnya rantai logistik pascabencana. Kerangka strategi mitigasi ini diimplementasikan melalui jaminan pemenuhan pasokan komoditas strategis, perluasan cakupan KAD, serta eksekusi program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Sebagai pelengkap bauran strategi tersebut, penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah juga terus dioptimalkan sebagai mekanisme intervensi pasar untuk menyesuaikan harga komoditas pangan agar kembali ke tingkat harga normalnya.

2.4. Inflasi Spasial

2.4.1. Gambaran Umum

Pada triwulan II 2026, seluruh wilayah cakupan IHK di Provinsi Aceh mencatatkan inflasi secara tahunan. Secara spasial, Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi yang mencapai 7,25% (yoy). Sebaliknya, inflasi terendah dicatatkan oleh Meulaboh dengan capaian sebesar 3,89% (yoy). Tingginya tekanan inflasi tahunan di Aceh Tengah mengindikasikan adanya fenomena *second round effect* pada komoditas makanan jadi pascabencana karena tingginya biaya bahan pangan, yang terjadi bersamaan dengan lonjakan permintaan bahan bangunan seiring berjalannya fase rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut.

Grafik 2.4. Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% ,yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Jika dilihat secara bulanan, inflasi tertinggi berasal dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tamiang justru mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,79% (mtm), sementara Meulaboh menjadi satu-satunya daerah yang mengalami deflasi yakni sebesar 0,03% (mtm). Deflasi bulanan yang terjadi di wilayah Meulaboh ini utamanya didorong oleh normalisasi harga komoditas hortikultura, yang mengindikasikan mulai berangsur pulihnya pasokan di wilayah tersebut.

2.4.2. Inflasi Kota Banda Aceh

Kontributor terbesar terhadap kenaikan harga di Kota Banda Aceh bersumber dari komoditas emas perhiasan dan nasi dengan lauk. Masing-masing komoditas tersebut memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,88% dan 0,49%. Tekanan harga lebih lanjut disumbang oleh pergerakan tarif energi dan transportasi, yakni bensin dan angkutan udara yang memberikan andil berturut-turut mencapai 0,30% dan 0,29%. Selain itu, komoditas pangan pokok seperti beras turut memberikan dorongan lebih lanjut terhadap inflasi umum di kota ini, dengan kontribusi sebesar 0,28%.

Sementara itu, laju inflasi secara agregat di Kota Banda Aceh tertahan oleh tren penurunan harga yang berpusat pada subkelompok pakaian dan biaya pendidikan. Komoditas baju muslim wanita menjadi penahan inflasi paling signifikan dengan mencatatkan andil deflasi terdalam sebesar -0,15%. Penurunan tingkat harga juga tercatat pada biaya pendidikan, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar -0,11% dan -0,07%. Lebih lanjut, tekanan inflasi juga ditahan oleh pergerakan harga komoditas udang basah dan kelapa dengan kontribusi deflasi secara berurutan sebesar -0,05% dan -0,04%.

Tabel 2.14. Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% , yoy)

Kota Banda Aceh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	0,88	Baju Muslim Wanita	-0,15
Nasi Dengan Lauk	0,49	Sekolah Menengah Atas	-0,11
Bensin	0,30	Sekolah Menengah Pertama	-0,07
Angkutan Udara	0,29	Udang Basah	-0,05
Beras	0,28	Kelapa	-0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.4.3. Inflasi Kota Lhokseumawe

Kontributor utama terhadap kenaikan inflasi di Kota Lhokseumawe bersumber dari komoditas nasi dengan lauk dan pergerakan nilai emas perhiasan. Kedua komoditas tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,91% dan 0,51%. Tekanan harga lebih lanjut disumbang oleh komoditas perikanan, yaitu ikan tongkol/ikan ambu-ambu

dengan andil mencapai 0,46%. Selain itu, pasokan komoditas pangan strategis seperti ikan dencis dan beras turut memberikan dorongan lebih lanjut terhadap inflasi, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,29% dan 0,24%.

Adanya tren penurunan harga pada kelompok makanan menjadi penahan laju laju inflasi di Lhokseumawe. Komoditas ikan tuna menjadi penahan inflasi paling signifikan dengan mencatatkan andil deflasi sebesar -0,07%. Penurunan tingkat harga yang sangat tipis juga tercatat secara merata pada komoditas sayuran dan buah-buahan seperti kacang panjang, salak, telur puyuh, dan anggur, yang masing-masing menyumbang andil deflasi marginal sebesar -0,01%.

Tabel 2.15. Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% , yoy)

Kota Lhokseumawe			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Nasi Dengan Lauk	0,91	Ikan Tuna	-0,07
Emas Perhiasan	0,51	Kacang Panjang	-0,01
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	0,46	Salak	-0,01
Ikan Dencis	0,29	Telur Puyuh	-0,01
Beras	0,24	Anggur	-0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.4.4. Inflasi Kota Meulaboh

Di Kota Meulaboh, tekanan inflasi didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan dan nasi dengan lauk. Secara berurutan masing-masing menyumbang andil sebesar 0,54% dan 0,39%. Peningkatan harga lebih lanjut juga dipicu oleh gejolak pada komoditas hortikultura, khususnya cabai merah yang mencatatkan andil 0,22%, disusul oleh tomat sebesar 0,19%. Di samping komoditas pangan, penyesuaian harga bensin turut mempertegas laju inflasi dengan kontribusi mencapai 0,17%.

Di sisi lain, pergerakan inflasi di Meulaboh tertahan oleh penurunan harga pada kebutuhan perawatan bayi dan komoditas perikanan laut. Popok bayi sekali pakai/diapers

Tabel 2.16. Andil Inflasi di Meulaboh (% , yoy)

Kota Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	0,54	Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	-0,10
Nasi Dengan Lauk	0,39	Ikan Cakalang/Ikan Sisik	-0,06
Cabai Merah	0,22	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	-0,06
Tomat	0,19	Angkutan Udara	-0,05
Bensin	0,17	Pembalut Wanita	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

menjadi faktor peredam utama dengan andil deflasi sebesar -0,10%. Pelemahan harga juga terjadi pada ikan cakalang/ikan sisik serta ikan tongkol/ikan ambu-ambu, di mana keduanya mencatatkan andil deflasi yang identik yakni -0,06%. Lebih jauh, penurunan tarif angkutan udara (-0,05%) dan harga pembalut wanita (-0,02%) semakin melengkapi faktor-faktor penahan laju inflasi agregat di kota ini.

2.4.5. Inflasi Kabupaten Aceh Tengah

Pendorong inflasi di Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, yaitu bersumber dari kenaikan harga produk makanan jadi dan olahan tembakau. Nasi dengan lauk dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) menjadi kontributor utama dengan andil inflasi yang persisten, masing-masing sebesar 0,63% dan 0,56%. Tekanan harga berlanjut pada komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang mencatatkan andil 0,50%. Tren kenaikan ini semakin kuat dengan dorongan dari produk makanan jadi lainnya, yaitu bakso siap santap dan mie, yang masing-masing menyumbang andil 0,37% dan 0,26%.

Berbeda dengan wilayah IHK lainnya di Provinsi Aceh, dinamika pergerakan harga komoditas penyumbang deflasi di Kabupaten Aceh Tengah tergolong sangat minim. Walaupun terdapat penurunan harga pada beberapa subkelompok kesehatan, tidak ditemukan adanya komoditas deflasi yang andilnya cukup kuat untuk mampu bertindak sebagai shock absorber dalam menahan laju inflasi di kabupaten ini.

Tabel 2.17. Andil Inflasi di Aceh Tengah (% , yoy)

Kabupaten Aceh Tengah	
Andil Inflasi	
Nasi Dengan Lauk	0,63
Sigaret Kretek Tangan	0,56
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,50
Bakso Siap Santap	0,37
Mie	0,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.4.6. Inflasi Kabupaten Aceh Tamiang

Di Kabupaten Aceh Tamiang, komoditas pangan menjadi pendorong utama inflasi. Komoditas beras dan cabai merah memberikan andil yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 1,42% dan 0,69%. Selain itu terdapat kenaikan harga SKM yang menyumbang andil sebesar 0,47%. Komoditas pangan olahan sehari-hari seperti minyak goreng dan nasi dengan lauk juga mengalami tren kenaikan, dengan kontribusi inflasi secara berurutan sebesar 0,31% dan 0,28%.

Meskipun tekanan inflasinya tergolong tinggi, laju inflasi di Aceh Tamiang tertahan oleh kebijakan utilitas daerah dan melimpahnya pasokan komoditas perikanan. Penyesuaian tarif

air minum PAM menjadi penahan inflasi paling krusial dengan andil deflasi yang sangat dalam mencapai -0,53%. Kondisi ini didukung oleh kontraksi harga pada komoditas perikanan seperti ikan biji nangka/ikan kuniran (-0,16%), ikan bandeng/ikan bolu (-0,04%), serta ikan dencis (-0,03%).

Tabel 2.18. Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% , yoy)

Kabupaten Aceh Tamiang			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Beras	1,42	Tarif Air Minum PAM	-0,53
Cabai Merah	0,69	Ikan Biji Nangka/ Ikan Kuniran	-0,16
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,47	Ikan Bandeng/Ikan Bolu	-0,04
Minyak Goreng	0,31	Ikan Dencis	-0,03
Nasi Dengan Lauk	0,28	Kelapa	-0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Upaya untuk memastikan tingkat inflasi Aceh tetap terkendali pada rentang sasaran 2,5% ± 1% dihadapkan pada berbagai tantangan. Tekanan inflasi bersumber dari efek rambatan pascabencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025, permintaan *seasonal* konsumsi masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta dinamika geopolitik global yang terus tereskalasi. Lebih lanjut, anomali cuaca pada pertengahan tahun yang berisiko menghambat aktivitas produksi pertanian juga menjadi faktor risiko yang patut diwaspadai. Merespons berbagai tantangan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bersinergi dengan TPID di Provinsi Aceh mengambil langkah-langkah mitigasi yang strategis, terukur, dan efektif. Adapun langkah-langkah yang telah dan akan terus diakselerasi di bawah kerangka strategi 4K adalah sebagai berikut:

- Keterjangkauan Harga
 - Melaksanakan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP, Pasar Murah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 23 kab/kota di Provinsi Aceh, dengan prioritas pada 5 kab/kota IHK, serta menggelar Pasar Murah Daging khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan saat tradisi Meugang dan HBKN— (Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha).
 - Melakukan sidak pasar secara berkala dalam memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan selama HBKN Ramadhan.
 - Menyalurkan bantuan dan pelatihan (capacity building) kepada petani untuk meningkatkan produktivitas, khususnya di wilayah terdampak bencana.
 - Memperkuat sinergi dengan BUMN dalam menjamin ketersediaan energi dan cadangan pangan pemerintah.

2. Ketersediaan Pasokan
 - a. Melakukan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
 - b. Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) antar daerah sentra dan non sentra, terutama untuk komoditas pangan strategis, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
 - c. Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra melalui optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.
 - d. Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis.
 - e. Melakukan fasilitasi *contract farming* antara UMKM dan kelompok tani produsen pangan strategis.
 - f. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam rangka pemantauan pasokan dan pengendalian inflasi.
3. Kelancaran Distribusi
 - a. Mendorong program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) atau Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) yang efektif dan terarah pada komoditas strategis penyebab inflasi, terutama pada komoditas pangan.
 - b. Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.
4. Komunikasi Efektif
 - a. Mengoptimalkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning system* inflasi.
 - b. Menyelenggarakan *capacity building* kepada TPID se-Provinsi Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi dalam pengendalian inflasi.
 - c. Melaksanakan high level meeting TPID Provinsi Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2026.
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan yang dihadiri TPID Provinsi Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Aceh.

Kasus Karhutla di Provinsi Aceh Relatif Terbatas Sehingga Implikasinya Minim Terhadap Sektor Pertanian Serta Inflasi Pangan

BOKS 2

Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terpantau di wilayah Provinsi Aceh pada periode Agustus 2026 dilaporkan masih berada dalam kategori tingkat risiko yang rendah dan terkendali. Berbeda halnya dengan dampak anomali iklim ekstrem maupun bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu *supply shock* berskala besar, rentetan kemunculan titik panas sejauh ini belum memberikan dampak kerusakan yang signifikan. Kondisi tersebut terpantau tidak mengganggu kualitas udara dan tidak merusak luasan lahan pertanian produktif. Secara umum, perkembangan ini memberikan sinyal yang positif bagi upaya menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah.

Berdasarkan rilis data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sepanjang bulan Agustus 2026 hanya terdeteksi sebanyak 13 titik panas yang tersebar di beberapa lokasi. Secara kumulatif, luasan lahan yang mengalami dampak kebakaran sangat minim, yakni hanya mencapai sekitar 24,37 hektare. Secara spasial, sebaran insiden tersebut terpusat di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 11 titik panas (dengan luasan terdampak 18,87 hektare), disusul oleh Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 1 titik panas (3 hektare), dan Kota Lhokseumawe sebanyak 1 titik panas (2,5 hektare). Skala luasan kebakaran yang terbatas ini secara langsung memastikan bahwa kapasitas produksi pada LU Pertanian tidak terdampak. Dengan demikian, risiko gangguan ketersediaan komoditas yang berpotensi memicu lonjakan inflasi pada kelompok pangan dapat dihindarkan secara optimal.

Memasuki paruh kedua bulan Agustus 2026, prospek meredanya kejadian Karhutla beserta membaiknya kondisi cuaca semakin terkonfirmasi. Merujuk pada hasil pantauan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 20 Agustus 2026, terpantau tidak ditemukannya keberadaan hotspot yang terdeteksi di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Perkembangan cuaca ini sejalan dengan rilis Peta Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis dari BMKG, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun wilayah di Aceh yang masuk ke dalam kategori peringatan dini kekeringan.

Ke depan, prospek terjaganya stabilitas harga beserta ketersediaan pasokan pangan akan terus didukung oleh penguatan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan risiko bencana. Sinergi yang bersifat preventif terus diakselerasi melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara BNPB dan BPBA. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) Aceh yang terintegrasi secara baik dan akurat. Langkah struktural ini juga turut diiringi dengan intensifikasi kegiatan patroli guna mendukung deteksi dini di sejumlah wilayah rawan, serta peningkatan edukasi persuasif kepada masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran lahan. Melalui serangkaian intervensi tersebut, tekanan inflasi yang bersumber dari jalur pasokan domestik akibat disrupsi faktor alam diperkirakan akan tetap berada pada level yang stabil dan terkendali.

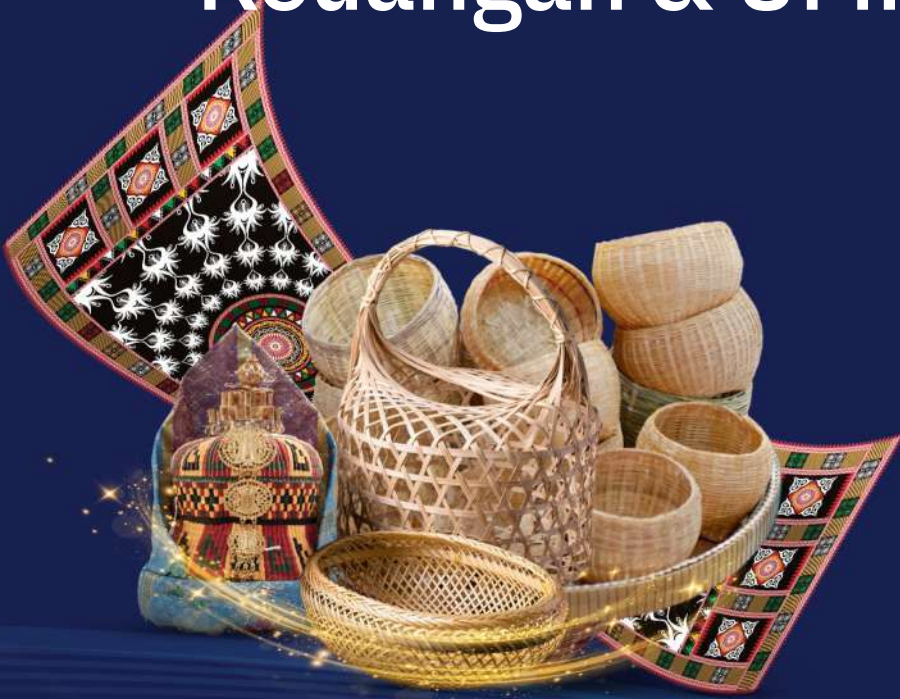
Persebaran Wilayah Terdampak Karhutla Di Provinsi Aceh
Bulan Agustus 2026



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), diolah

03.

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan & UMKM



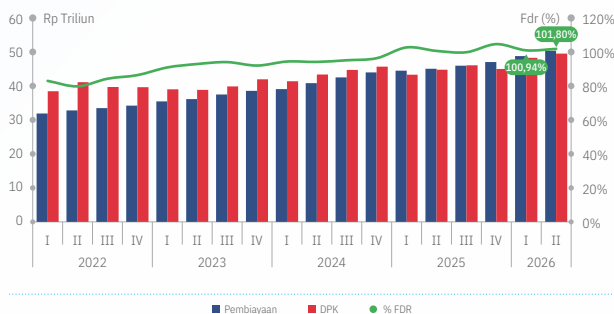


Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan pembiayaan diiringi dengan kualitas yang baik tercermin dari masih rendahnya *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu, inklusivitas pembiayaan juga menunjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 25,30%. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami ekspansi sebesar 10,54% (yoy).

3.1. Kondisi Umum

Kinerja intermediasi perbankan tetap terjaga pada triwulan II 2026, tercermin dari masih positifnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan masih tingginya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan pada triwulan II 2026 mencapai Rp50,38 triliun atau meningkat sebesar 11,86% (yoy) dibandingkan triwulan II 2025. Kemudian, penghimpunan DPK tercatat Rp49,49 triliun atau meningkat sebesar 10,54% (yoy). Dengan demikian, *Financing Deposit Ratio* (FDR) mencapai 101,80% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada triwulan yang sama pada 100,60% (Grafik 3.1). Peningkatan FDR ini menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pembiayaan secara tahunan.

Grafik 3.1. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)

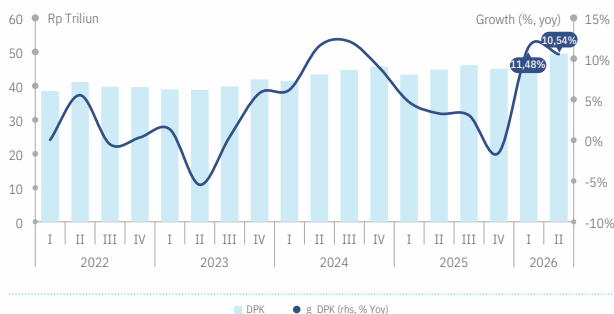


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Kinerja penghimpunan DPK mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Nominal DPK Pada triwulan II 2026, mencapai Rp49,49 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan nominal Rp44,77 triliun serta terekspansi sebesar 10,54% (yoy). Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pada DPK korporasi dan perseorangan yang masing-masing sebesar 30,87% dan 12,59% secara tahunan.

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan juga menunjukkan peningkatan. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2026 sebesar

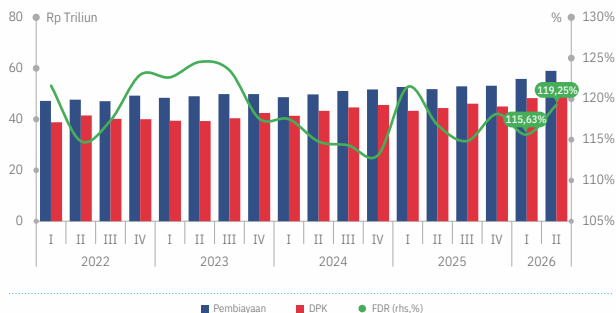
Grafik 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Rp59,02 triliun meningkat 13,79% jika dibandingkan dengan triwulan II pada tahun sebelumnya. Kemudian, FDR berdasarkan lokasi proyek tercatat sebesar 119,25% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 115,63% (Grafik 3.3).

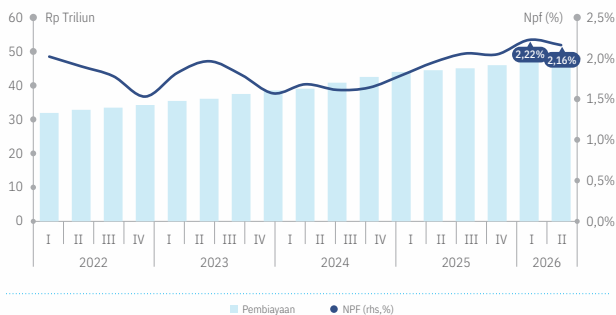
Grafik 3.3. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan II 2026 menunjukkan kondisi yang terjaga. Secara agregat, risiko pembiayaan di Provinsi Aceh masih terjaga dalam batas aman yang tercermin dari *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 2,11%. Menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,16% (Grafik 3.4.). Angka tersebut juga masih berada di bawah *threshold* 5%.

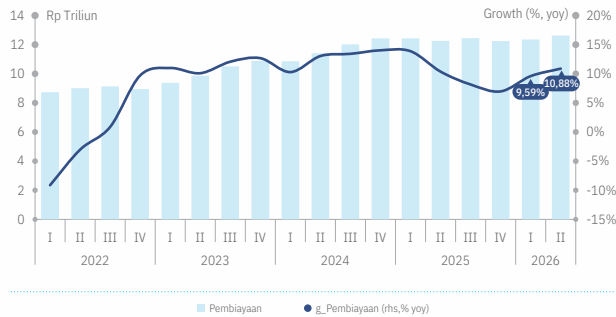
Grafik 3.4. Perkembangan Non-Performing Financing (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan tumbuh meningkat. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi bank pada triwulan II 2026 sebesar Rp50,38 triliun meningkat sebesar 11,86% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,59% (yoy) (Grafik 3.5). Hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi Aceh mulai pulih pascabencana yang direspons dengan baik oleh perbankan.

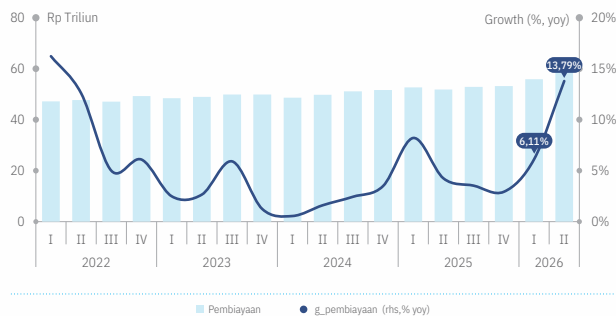
Grafik 3.5. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Selain itu, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh juga menunjukkan peningkatan. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp59,02 triliun, atau meningkat 13,79% (yoy) dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,11% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp55,86 triliun. Selain itu, secara nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan nominal pembiayaan berdasarkan lokasi bank. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 3.6. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

3.2. Intermediasi Perbankan

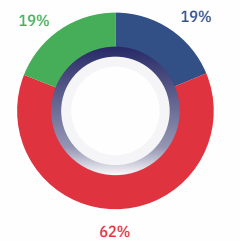
3.2.1. DPK Menurut Jenisnya

Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh. Pada triwulan II 2026, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 62%, diikuti deposito sebesar 19% dan giro sebesar 19%. Secara nominal, total DPK pada triwulan II 2026 adalah sebesar Rp49,49 triliun, yang terdiri dari tabungan Rp30,79 triliun, deposito sebesar Rp9,42 triliun, dan giro Rp9,29 triliun.

Pada triwulan laporan, jenis DPK yang tumbuh meningkat yaitu giro dan tabungan. Pada triwulan II 2026, giro dan tabungan merupakan jenis DPK yang mengalami peningkatan

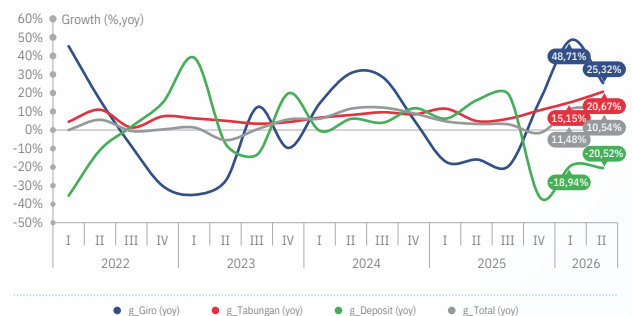
pertumbuhan yaitu masing-masing sebesar 25,32% (yoy) dan 20,67% (yoy). Sementara, deposito merupakan komponen DPK yang mengalami kontraksi sebesar -20,52% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -18,94% (yoy).

Grafik 3.7. Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 3.8. Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

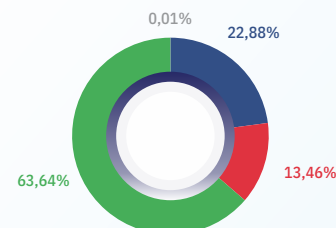


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

3.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 63,64%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi masing-masing memiliki porsi sebesar 22,88% dan 13,46%.

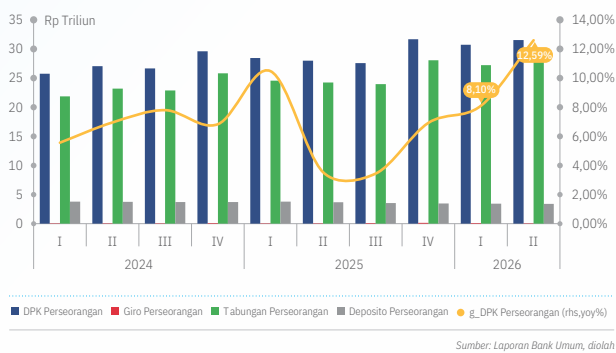
Grafik 3.9. Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

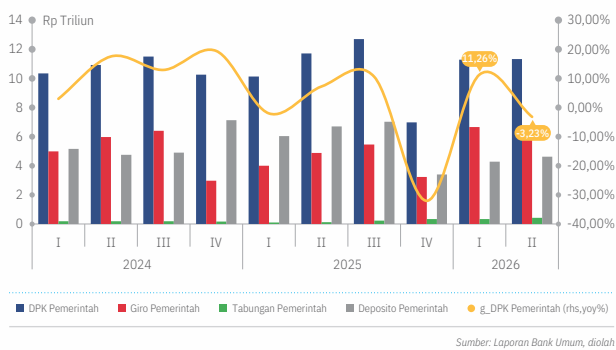
DPK perseorangan masih didominasi oleh tabungan. Secara keseluruhan, DPK Perseorangan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 12,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,10% (yoy). DPK perseorangan pada triwulan laporan, utamanya terdiri dari tabungan dengan pangsa sebesar 88,99%, deposito dengan pangsa sebesar 10,76%, dan giro dengan pangsa sebesar 0,25%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk tabungan mengalami peningkatan sebesar 15,76% (yoy). Sementara itu giro dan deposito mengalami kontraksi masing-masing sebesar -5,58% (yoy) dan -7,85 (yoy).

Grafik 3.10. Perkembangan DPK Perseorangan



Pada triwulan laporan, DPK pemerintah terkontraksi sebesar -3,23% (yoy). Penurunan tersebut, utamanya disebabkan oleh melambatnya deposito pemerintah sebesar -31,04% (yoy). Di sisi lain, giro dan tabungan pemerintah memperlihatkan pertumbuhan secara tahunan sebesar 28,53% (yoy) dan 252,48% (yoy) untuk masing-masing.

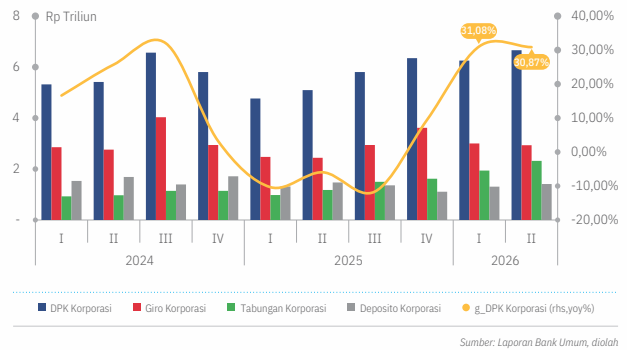
Grafik 3.11. Perkembangan DPK Pemerintah



DPK korporasi sebagian besar masih bersumber dari giro. Secara keseluruhan, DPK Korporasi pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 30,87% (yoy), *on-track* dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 31,08% (yoy). Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan, utamanya terdiri dari giro sebesar 44%, deposito sebesar 21,12%, dan tabungan sebesar 34,87%. DPK korporasi giro mengalami pertumbuhan sebesar

19,98% (yoy). Kemudian, tabungan korporasi turut mengalami pertumbuhan secara tahunan sebesar 97,25% (yoy). Di sisi lain, DPK korporasi jenis deposito mengalami perlambatan secara yoy, yakni pada -4,24% (yoy).

Grafik 3.12. Perkembangan DPK Korporasi

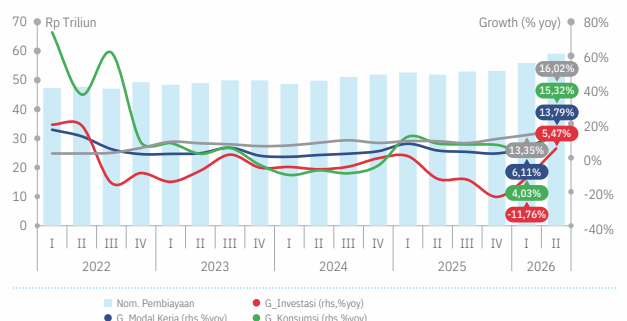


3.2.3. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pembiayaan konsumsi masih mendominasi penyaluran pembiayaan di Aceh. Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 13,79% (yoy), yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu terus didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Seluruh jenis penggunaan pembiayaan tercatat mengalami pertumbuhan pada triwulan berjalan. Pembiayaan konsumsi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 16,02% (yoy), diikuti oleh pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing sebesar 15,32% (yoy) dan 5,47% (yoy).

Pembiayaan konsumtif di Aceh masih lebih tinggi dibandingkan pembiayaan produktif. Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 63%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 37%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi

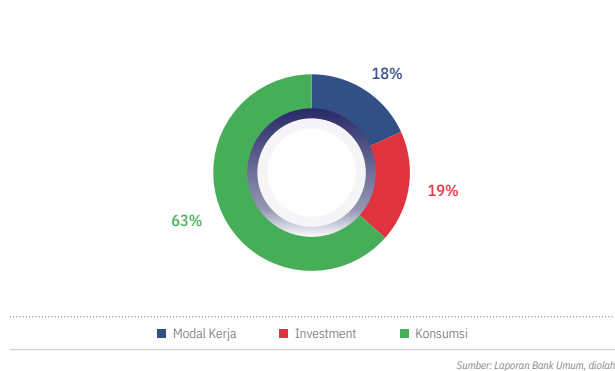
Grafik 3.13. Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)



menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 19% dan 18% dari total pembiayaan pada triwulan laporan.

Peningkatan pembiayaan konsumsi searah dengan hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk konsumsi meningkat hingga Triwulan II 2026. Pada triwulan berjalan, indeks untuk pengeluaran konsumsi tercatat 114,87 lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 107,1 atau naik sebesar 7,25% (yoy).

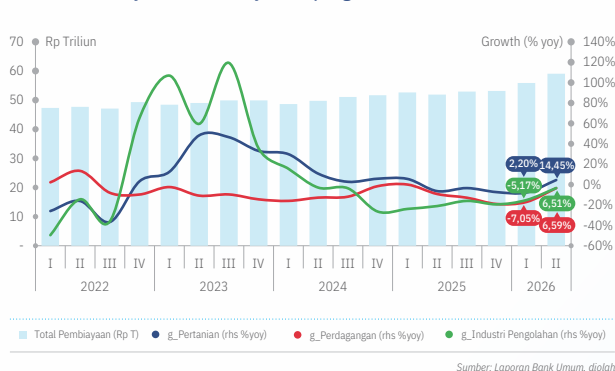
Grafik 3.14. Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan



3.2.4. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran pembiayaan terbesar masih kepada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan II 2026, porsi pembiayaan untuk LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 11,77%. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,51% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -7,05% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 9,19% dan 7,10%. Pada triwulan II 2026, kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 14,45% (yoy), serta lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 2,20% (yoy).

Grafik 3.15. Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha

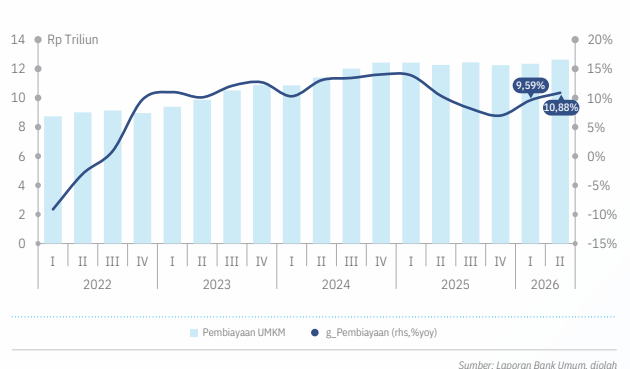


Kemudian, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,59% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -5,17% (yoy).

3.2.5. Pembiayaan UMKM

Kinerja penyaluran pembiayaan untuk UMKM pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan. Pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat tumbuh sebesar 10,88% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,59% (yoy). Secara nominal, pembiayaan UMKM pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp12,63 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12,34 triliun. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan II 2026 sebesar 25,30%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

Grafik 3.16. Perkembangan Pembiayaan UMKM



Bank Indonesia terus mendorong perbankan di untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi UMKM. Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan Loan to Funding Ratio sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

3.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

Kpw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pendampingan dan pelatihan bagi UMKM di Aceh untuk penyusunan laporan keuangan melalui

optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan survei *Database* Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). KPw BI Provinsi Aceh turut melakukan fasilitasi UMKM pada perluasan akses pasar dan promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui program-program seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Industri Kreatif Syariah (IKRA).

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh konsisten menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Aceh UMKM Digdaya yang telah berjalan sejak 2014. Program yang diadakan tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Provinsi Aceh sehingga dapat naik kelas. Di samping itu, program Aceh UMKM Digdaya ditujukan untuk mendorong kemampuan ekspor, mendukung ekonomi dan keuangan syariah, serta

mengembangkan produk dan jasa unggulan daerah. Lebih lanjut, program ini dapat menciptakan ekosistem wirausaha di Provinsi Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Inisiatif ini sejalan dengan program prioritas nasional dan implementasi Asta Cita dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, sebagai upaya strategis mencetak wirausaha baru yang produktif, resilien, dan berdaya saing.

Kpw BI Provinsi Aceh senantiasa melakukan sinergi dengan perbankan syariah di Aceh dalam mendorong pembiayaan. Pada kegiatan Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2026, KPw BI Provinsi Aceh bersama perbankan melakukan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dengan total nilai sebesar Rp2,11 miliar. Pada kegiatan tersebut juga turut diraih total penjualan UMKM senilai Rp2,9 miliar.



04.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



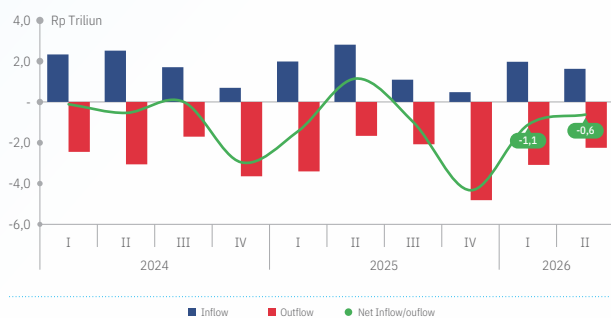


Pada triwulan II 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung aktivitas perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, tercermin dari terjadinya *net outflow* pada triwulan laporan. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai, khususnya melalui penggunaan APMK dan QRIS, terus menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

4.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pengedaran uang kartal pada Triwulan II 2026 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2026. Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp0,6 triliun dengan komposisi total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp1,6 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp2,2 triliun (Grafik 4.1). *Net outflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal masih lebih besar dibandingkan setoran kembali ke Bank Indonesia, sehingga posisi *net outflow* tetap berlanjut pada Triwulan II 2026.

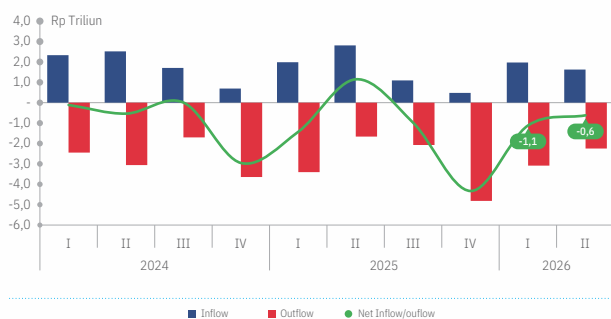
Grafik 4.1. Netflow Kas (Rp Triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 35,02% (yoy) sedangkan *inflow* terkontraksi sebesar 42,2% (yoy) (Grafik 4.2). Perkembangan tersebut mengindikasikan tingginya kebutuhan uang kartal masyarakat, tercermin dari meningkatnya penarikan uang dari Bank Indonesia yang sejalan dengan momentum HBKN Idulfitri dan IdulAdha 1447H.

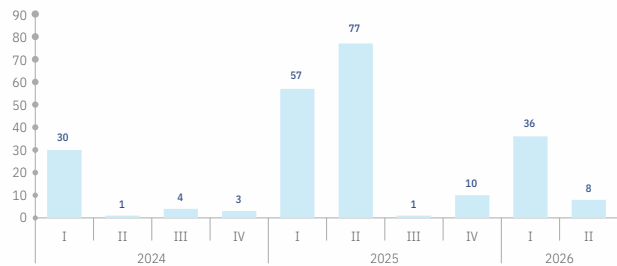
Grafik 4.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dan masih dalam batas yang aman. Temuan tersebut berasal dari penukaran masyarakat, penukaran perbankan, serta temuan kepolisian. (Grafik 4.3).

Grafik 4.3. Temuan Uang Palsu (Lembar)

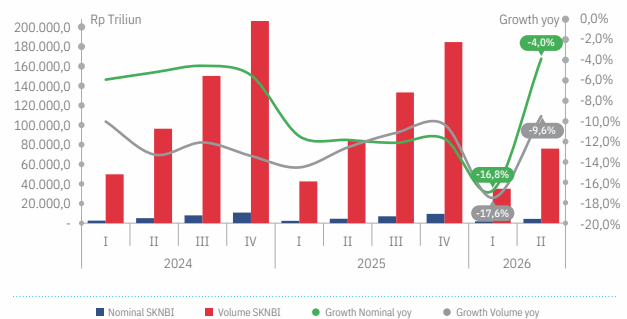


Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Perkembangan pembayaran non tunai baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, terus menunjukkan tren positif. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi di provinsi Aceh, terdapat peningkatan preferensi masyarakat Aceh dalam melakukan transaksi secara non tunai. Hal ini tercermin dari masif nya pemanfaatan pembayaran non tunai menggunakan instrumen APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), instrumen Uang Elektronik (UE) baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Tren penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga bergerak positif diiringi dengan penurunan tren pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) ritel.

Grafik 4.4. Perkembangan SKNBI

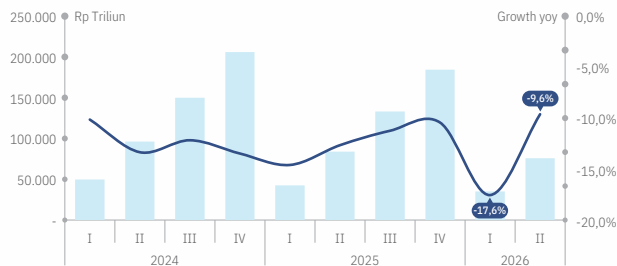


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, volume transaksi SKNBI meningkat sebesar 16,7% (qtq) menjadi 40.862 transaksi dibandingkan 35.012 transaksi pada Triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, nominal transaksi SKNBI juga meningkat sebesar 25,6% (qtq) menjadi Rp2.384,7 miliar dari Rp1.898,6 miliar pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.4).

Namun demikian, secara tahunan (yoy) kinerja transaksi SKNBI masih menunjukkan perlambatan. Hingga Triwulan II 2026, volume transaksi SKNBI tercatat terkontraksi 9,6% (yoy) transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal transaksi SKNBI tercatat turut terkontraksi 4,0% (yoy) dibandingkan Triwulan II 2025 (Grafik 4.4).

Grafik 4.5. Perkembangan BI-RTGS

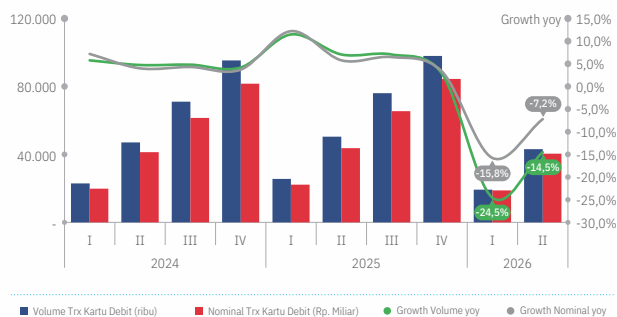


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, perkembangan sistem pembayaran nilai besar melalui Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada Triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan dari sisi volume transaksi. Secara triwulanan, volume transaksi BI-RTGS pada Triwulan II 2026 meningkat 4,0% (qtq) menjadi 6.117 transaksi dari 5.879 transaksi pada Triwulan I 2026. Sementara itu, nominal transaksi menurun 19,7% (qtq) menjadi Rp9,8 triliun dari Rp12,2 triliun pada triwulan sebelumnya.

Secara tahunan, volume transaksi BI-RTGS hingga Triwulan II 2026 tumbuh 16,4% (yoy), sedangkan nominal transaksi tercatat terkontraksi 6,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.5).

Grafik 4.6. Transaksi ATM Debit

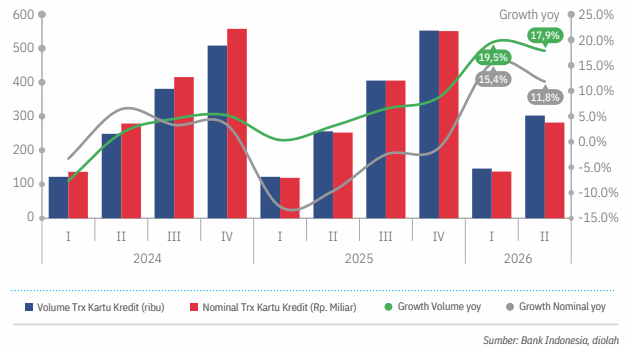


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi menggunakan kartu ATM debit mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya. Namun secara tahunan, volume transaksi pada triwulan laporan tercatat menurun sebesar 14,5% (yoy) menjadi 43 juta transaksi dari

50 juta transaksi pada triwulan II 2025. Sementara nominal transaksi kartu ATM debit tercatat sebesar Rp40 Triliun atau turun sebesar 7,2% (yoy) (Grafik 4.6).

Grafik 4.7. Transaksi Kartu Kredit



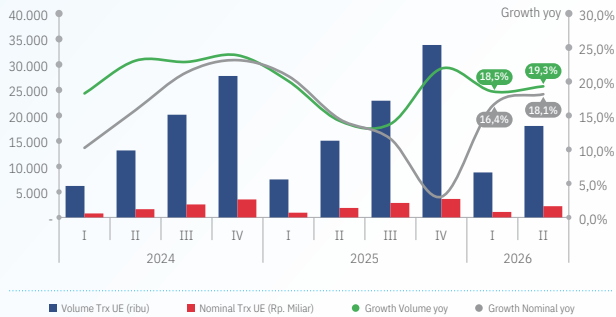
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi kartu kredit turut mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya. Secara tahunan, Volume transaksi naik sebesar 17,9% (yoy) atau menjadi sebesar 302 ribu transaksi (Grafik 4.7). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp282 miliar atau tumbuh sebesar 11,8% (yoy). Selama triwulan II 2026, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp135 miliar atau 94% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 151.421 transaksi atau 97% dari total volume transaksi.

Seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya. Transaksi UE secara nominal pada triwulan II 2026 mencapai Rp2.206 miliar atau naik sebesar 18,1% (yoy). Sementara volume transaksi UE naik sebesar 19,3% (yoy) atau sebanyak 17,9 juta transaksi selama triwulan II 2026 (Grafik 4.8). Tren transaksi UE yang terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun merchant.

Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Meningkatnya minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce*. Selama triwulan II 2026, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp725 miliar atau 65% dari total nominal transaksi dengan volume sebanyak 7,6 juta transaksi atau 84% dari total volume transaksi.

Grafik 4.8. Perkembangan Transaksi UE

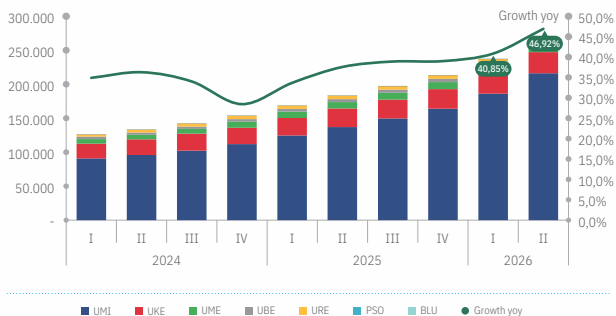


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Implementasi QRIS menjadi pendorong meningkatnya transaksi UE berbasis server (*server based*) di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui QRIS mengalami peningkatan yang tercermin dari perkembangan volume dan nominal transaksinya. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Peningkatan transaksi QRIS didukung oleh terus meningkatnya jumlah *merchant*. Hingga triwulan II 2026, terdapat 313.699 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 4.9). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 46,92% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 213.516 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 13,4% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 276.641 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 252.183 *merchant* (78,4%).

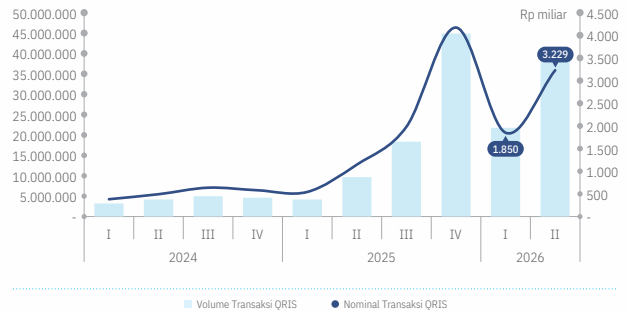
Grafik 4.9. Perkembangan Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan II 2026 telah terdapat 803.076 pengguna atau bertambah sebanyak 52.158 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan II 2026 terdapat 40,8 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp3.229 miliar (Grafik 4.10). Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen sebagai penyumbang kenaikan volume dan nominal QRIS.

Grafik 4.10. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

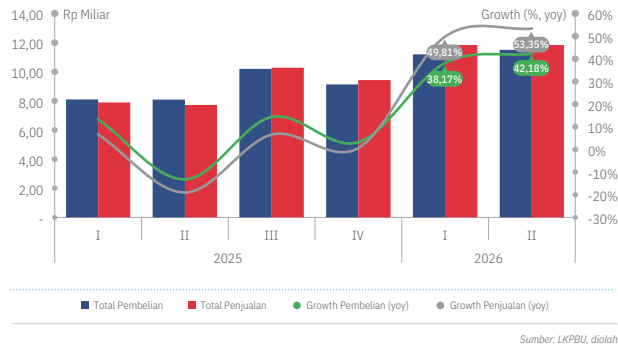
Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil, Bank Indonesia juga berperan sebagai regulator Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di daerah.

Hingga triwulan II 2026, terdapat 13 (tiga belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan II 2026, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 47,63% (yoy) menjadi Rp23,34 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp15,81 miliar.

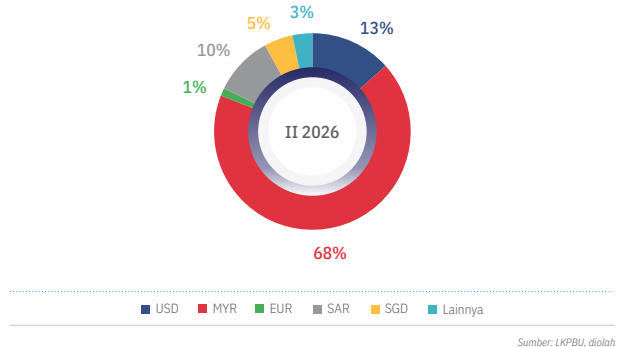
Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan menunjukkan adanya peningkatan. Pembelian UKA di Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 masih tumbuh sebesar 42,18% (yoy) yaitu dari Rp8,09 miliar pada triwulan I 2025 menjadi Rp11,50 miliar. Sejalan dengan hal tersebut penjualan UKA pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 53,35% (yoy) dari Rp7,72 miliar pada triwulan I 2025 menjadi Rp11,84 miliar (Grafik 4.11).

Grafik 4.11. Transaksi KUPVA BB



Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 67,59% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 13,37% (Grafik 4.12). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor geografis, pariwisata, pendidikan, ekspor impor, dan remitansi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Grafik 4.12. Disagregasi Transaksi UKA



4.4. Penyaluran PKH dan Program Sembako

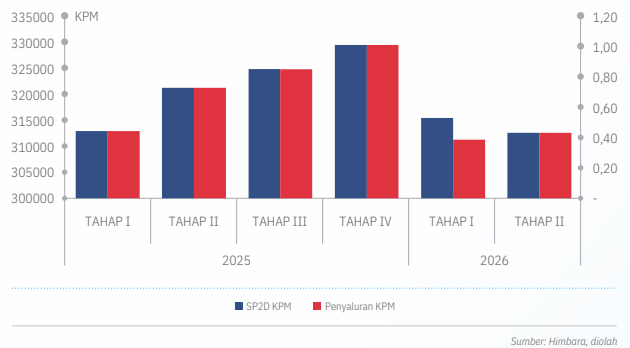
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Sesuai instruksi Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyaluran secara tunai dilakukan oleh PT Pos Indonesia, sedangkan penyaluran secara non tunai dilakukan oleh Himbara - BSI. Jenis bantuan sosial yang disalurkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki

akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

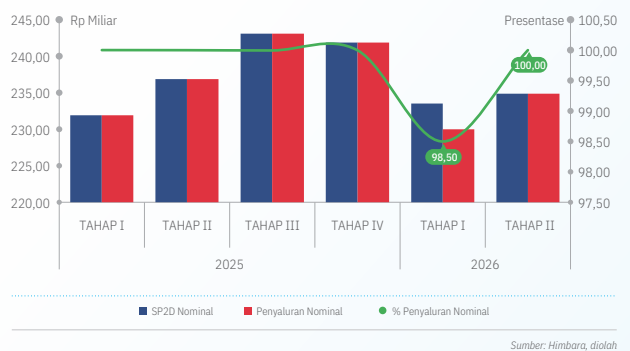
Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap II tahun 2026 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 100,00% kepada KPM (Grafik 4.13). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap II tercatat sebanyak 312.171 atau telah mencapai 99,87% dari target jumlah penerima sebanyak 312.567 KPM. Kenaikan penyaluran pada triwulan laporan didukung oleh peningkatan efektivitas proses penyaluran oleh BSI dan kesiapan infrastruktur sistem pembayaran.

Grafik 4.13. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Grafik 4.14. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



Dari aspek nominal, besaran bantuan yang disalurkan pada setiap tahap mengalami fluktuasi seiring dengan penyesuaian terhadap data KPM yang diperbarui secara berkala oleh

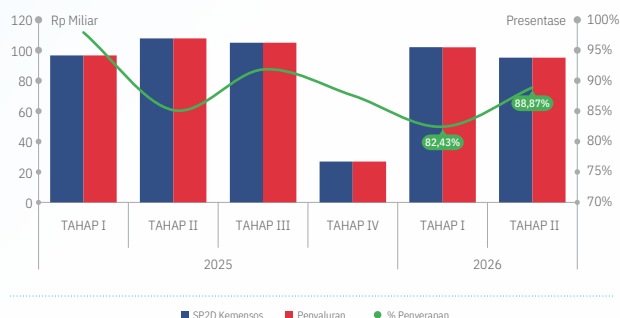
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada Tahap II tahun 2026, nominal bantuan yang disalurkan mencapai sebesar Rp234,87 miliar dengan tingkat penyaluran PKH yang telah mencapai 100,00% (Grafik 4.14). Jumlah tersebut menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan Tahap II tahun 2025, yaitu sebesar Rp236,85 miliar.

Pada Tahap II 2026, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp95 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 88,87% (Grafik 4.15). Jumlah tersebut turun dibandingkan Tahap II 2025

sebesar Rp108 miliar. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme non tunai oleh Himbara-BSI di 72 Kab/Kota dan mekanisme tunai oleh PT Pos Indonesia di 22 Kab/Kota di Provinsi Aceh.

Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan turun menjadi 476 ribu KPM dari jumlah KPM Tahap II 2025 sebanyak 539 ribu KPM (Grafik 4.16) yang disebabkan oleh turunnya target SP2D Kemensos. Meski demikian, penyaluran tetap tinggi didukung oleh efektivitas proses penyaluran oleh Himbara-BSI dan PT Pos Indonesia.

Grafik 4.15. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Grafik 4.16. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah



05.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



//

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Mei 2026 sebesar 5,89%, stabil dibandingkan kondisi Februari 2026 yang sebesar 5,88%. Kondisi tersebut didukung oleh kualitas ketenagakerjaan yang cenderung membaik, tercermin dari meningkatnya proporsi pekerja formal dan menurunnya tingkat setengah pengangguran. Selain itu, jumlah penduduk bekerja juga bertambah sekitar 15 ribu orang dibandingkan Februari 2026, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih mampu menciptakan peluang kerja.

5.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada triwulan II 2026 stabil, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada Mei 2026, tingkat TPT di Provinsi Aceh tercatat sebesar 5,89%, stabil dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 5,88%. Sepanjang Februari 2026 hingga Mei 2026, jumlah pengangguran bertambah sekitar seribu orang, sementara jumlah penduduk bekerja meningkat sekitar lima belas ribu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja masih sedikit lebih tinggi dibandingkan penyerapan tenaga kerja, sehingga TPT mengalami kenaikan.

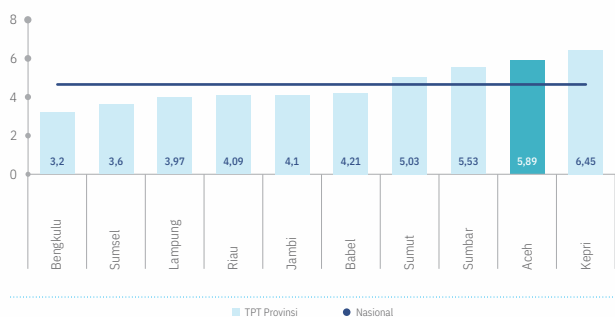
Tabel 5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran %	
Februari 2026	5,88%
Mei 2026	5,89%

Sumber: BPS, diolah

Pekerja pada lapangan usaha (LU) pertanian dan pertambangan mengalami penurunan. Jika dilihat dari pangsaanya, lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar pada Mei 2026 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -2,09%, diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar -0,59% dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar -0,48%.

Grafik. 5.1 Tingkat Pengangguran di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

TPT di Aceh masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan sebagian besar provinsi di Sumatera. Pada Mei 2026, TPT Aceh tercatat sebesar 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang sebesar 4,65 persen. Di wilayah Sumatera, tingkat pengangguran Aceh merupakan yang tertinggi, sedikit di atas Sumatera Barat (5,53 persen) dan Sumatera Utara (5,03 persen). **Di sisi lapangan usaha, beberapa sektor mengalami penurunan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dibandingkan Februari 2026.** Penurunan terbesar terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,09 persen poin, diikuti sektor

Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,59 persen poin, serta Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar 0,48 persen poin. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, dan Aktivitas Jasa Lainnya justru mencatat peningkatan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 5.2. Perkembangan TPT

Pengangguran	2026	2026
	Feb	Mei
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.500	2.515
Pengangguran	156	157
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	63,44	63,59
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	5,88	5,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 5.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

Sektor	Mei 2026 (%)
Pertanian	39,31
Perdagangan	14,77
Administrasi Pemerintahan	7,12
Industri Pengolahan	6,53
Konstruksi	6,26
Pendidikan	5,85
Akomodasi dan Makan Minum	5,40
Aktivitas Jasa Lainnya	4,48

Sumber: BPS, diolah

LU Pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar. Pangsa penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini mencapai 39,31%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,77%), Industri Pengolahan (7,12%), Pendidikan (6,53%), Konstruksi (6,26%), Administrasi Pemerintahan (5,85%), Akomodasi dan Makan Minum (5,40%), serta Aktivitas Jasa Lainnya (4,48%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh pada Mei 2026 masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Mei 2026, penduduk bekerja didominasi oleh tamatan SMA yaitu sebesar 36,76%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SD ke bawah sebesar 24,54%, SMP sebesar 16,75%, Diploma IV/S1/S2/S3 sebesar 14,16%, SMK sebesar 4,51%, dan Diploma I/II/III sebesar 3,29%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang relatif sama dibandingkan periode sebelumnya,

dengan dominasi tenaga kerja berpendidikan menengah. Selain itu, proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) mencapai 17,45% dari total penduduk bekerja.

Tabel 5.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	2026	2026
	Feb	Mei
Sekolah Menengah Atas	36,70%	36,76%
Sekolah Dasar ke Bawah	23,47%	25,54%
Sekolah Menengah Pertama	18,29%	16,75%
Diploma IV/S1/S2/S3	13,29%	14,16%
Sekolah Menengah Kejuruan	4,24%	4,51%
Diploma I/II/III	4,02%	3,29%

Sumber: BPS, diolah

Status pekerjaan di Aceh pada Mei 2026 mayoritas adalah **Buruh/Karyawan/Pegawai**. Status pekerjaan penduduk Provinsi Aceh didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 33,07%. Sementara itu, porsi terkecil adalah penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar sebesar 4,82%.

Sementara jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja informal mengalami penurunan. Pada Mei 2026, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 37,88%, sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 62,12%. Dibandingkan Februari 2026, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 2,03 persen poin, dari 35,85% menjadi 37,88%. Sebaliknya, persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami penurunan sebesar 2,03 persen poin, dari 64,15% menjadi 62,12%. Walaupun mengalami penurunan, proporsi pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Aceh. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena pekerja informal umumnya memiliki tingkat kepastian pendapatan dan perlindungan kerja yang lebih rendah dibandingkan pekerja formal, sehingga relatif lebih rentan terhadap guncangan ekonomi.

Tabel 5.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Porsi (%)	
	Feb 2026	Mei 2026
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,44%	33,07%
Berusaha Sendiri	18,44%	21,65%
Berusaha Dibantu Pekerja Tidak Tetap	19,18%	18,30%
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	13,42%	9,47%
Pekerja Bebas di Non Pertanian	5,17%	5,90%
Pekerja Bebas di Pertanian	7,95%	6,80%
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4,41%	4,82%

Sumber: BPS, diolah

4. Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Aceh pada Triwulan II 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada akhir Triwulan II 2026, NTP tercatat sebesar 125,34, meningkat dibandingkan Triwulan I 2026 yang sebesar 124,10. NTP yang berada di atas 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani dari hasil produksi masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang harus dibayarkan petani. Pada Triwulan II 2026, peningkatan NTP terjadi pada subsektor Hortikultura (NTPH) dari 90,38 menjadi 91,24, Perkebunan Rakyat (NTPR) dari 160,27 menjadi 160,86, serta Tanaman Pangan (NTPP) dari 104,07 menjadi 106,16. Sementara itu, subsektor Peternakan (NTPT) mengalami penurunan dari 102,21 menjadi 101,21 dan subsektor Perikanan (NTPN) menurun dari 122,80 menjadi 121,81.

Tabel 5.6. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP)	
Triwulan I 2026	124,10
Triwulan II 2026	125,34

Sumber: BPS, diolah

5.2. Kemiskinan

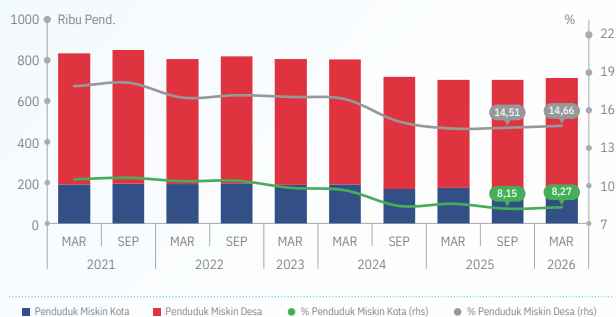
Angka kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan pada Maret 2026. Berdasarkan data terkini, persentase kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2026 tercatat sebesar 12,34%, meningkat 0,12 persen poin dibandingkan September 2025 sebesar 12,22%. Peningkatan angka kemiskinan di Aceh dipengaruhi oleh perlambatan sektor pertanian akibat bencana hidrometeorologi yang menurunkan produksi sejumlah komoditas pertanian, serta meningkatnya garis kemiskinan dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan persentase penduduk miskin didorong oleh kenaikan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Dibandingkan September 2025, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 meningkat dari 7,90% menjadi 8,22% di perkotaan dan dari 14,40% menjadi 14,55% di perdesaan. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin bertambah dari 703,38 ribu jiwa menjadi 713,78 ribu jiwa, yang mencerminkan peningkatan jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan.

Data tingkat kemiskinan pada Maret 2026 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Persentase penduduk miskin di Aceh tercatat sebesar 12,34%, lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 8,07%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Aceh masih relatif lebih besar dibandingkan rata-rata nasional, meskipun berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi terus dilakukan.

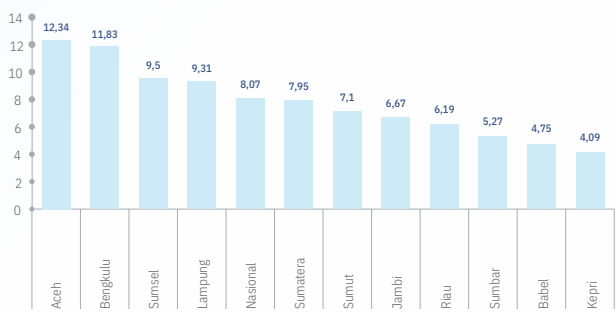
Grafik 5.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.3. Penduduk Miskin di Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Peningkatan tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa sebagian daya beli masyarakat belum mampu mengimbangi kenaikan Garis Kemiskinan. Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi Aceh, Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp742.464 per kapita per bulan, meningkat 3,83 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp715.103 per kapita per bulan. Sejalan dengan kenaikan tersebut, persentase penduduk miskin meningkat dari 12,22 persen pada September 2025 menjadi 12,34 persen pada Maret 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh sebagian kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Komoditas makanan masih menjadi komponen terbesar pembentuk garis kemiskinan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah komoditas makanan dengan sumbangan sebesar 75,62% di perkotaan dan 77,66% di pedesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, dan tongkol/tuna/cakalang. Sementara itu, komoditas bukan

makanan berkontribusi sebesar 24,38% di perkotaan dan 22,34% di pedesaan, dengan komoditas utama penyusun Garis Kemiskinan berupa perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Tabel 5.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

Kemiskinan	
Kemiskinan (%)	
September 2025	12,22
Maret 2026	12,34
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	
September 2025	2,055
Maret 2026	1,961
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
September 2025	0,523
Maret 2026	0,460

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2026 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. P1 menurun dari 2,055 pada September 2025 menjadi 1,961 pada Maret 2026. Begitu pula dengan P2 yang mengalami penurunan dari 0,523 pada September 2025 menjadi 0,460 pada Maret 2026. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara itu, penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin meningkat pada Maret 2026, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 5.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

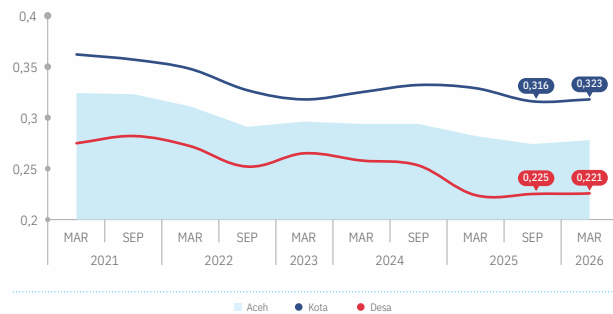
Daerah	September 2025		Maret 2026	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,216	0,244	1,306	0,313
Pedesaan	2,527	0,679	2,333	0,544
Gabungan	2,055	0,523	1,961	0,460

Sumber: Data BPS, diolah

Ketimpangan di perkotaan dan pedesaan menunjukkan perkembangan yang berbeda. Dalam pengukuran ketimpangan pengeluaran penduduk digunakan indikator Rasio Gini. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di wilayah perkotaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,323, meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,316. Sementara itu, Rasio Gini di wilayah pedesaan menurun dari 0,225 pada September 2025 menjadi 0,221 pada Maret 2026. Secara

keseluruhan, Rasio Gini Provinsi Aceh meningkat dari 0,274 pada September 2025 menjadi 0,275 pada Maret 2026, yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk. Meskipun demikian, tingkat ketimpangan di Aceh masih berada pada kategori ketimpangan rendah karena nilai Rasio Gini masih di bawah 0,4.

Grafik 5.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Sumber: BPS, diolah

06.

Prospek Perekonomian Daerah



//

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh secara keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,60%-5,10% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi Aceh seiring dengan pembangunan dan rekonstruksi daerah pascabencana, serta normalisasi aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, laju inflasi Provinsi Aceh di tahun 2026 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam *range* sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy), didukung oleh pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

6.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2025. Berdasarkan “*World Economic Outlook Update – Global Economy in Crosscurrents of War and Technology*” dari *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Juli 2026, perekonomian global tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 3,5% (yoy), dan diperkirakan kembali meningkat menjadi 3,4% (yoy) pada tahun 2027 (Tabel 7.1). Angka proyeksi tahun 2026 tersebut mengalami revisi ke bawah sebesar 0,1% (yoy) dibandingkan proyeksi pada “*World Economic Outlook*” (WEO) Edisi April 2026. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 utamanya dipengaruhi oleh dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, yang sebagian terimbangi oleh akselerasi momentum siklus teknologi global seiring dengan kemajuan dan adopsi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*).

Tabel 6.1. Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2026 (%yoy)

Wilayah	Okt'25	Jan'26	Apr'26	Jul'26
<i>World Output</i>	3,1	3,3	3,1	3,0
<i>Advance Economies</i>	1,6	1,8	1,8	1,7
United States	2,1	2,4	2,3	2,3
Euro Area	1,2	1,3	1,1	0,9
Japan	0,6	0,7	0,7	0,6
United Kingdom	1,3	1,3	0,8	1,0
<i>Emerging Market</i>	4,0	4,2	3,9	3,8
China	4,2	4,5	4,4	4,6
India	6,2	6,4	6,5	6,4

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat di tahun 2026 tercatat sebesar 2,3% (yoy). Angka proyeksi tahun 2026 tersebut relatif stabil dibandingkan proyeksi pada WEO Edisi April 2026. Kinerja perekonomian Amerika Serikat tersebut ditopang oleh kebijakan fiskal, kondisi keuangan yang akomodatif, serta berlanjutnya investasi dunia usaha terkait teknologi dan penguatan produktivitas, dengan dampak konflik geopolitik yang relatif terbatas mengingat posisi Amerika Serikat sebagai *net energy exporter*.

Revisi atas angka proyeksi juga terjadi pada negara-negara maju lainnya seperti negara anggota Uni Eropa dan Inggris. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Kawasan Euro (*Euro Area*), terdapat revisi ke bawah menjadi 0,9% (yoy) pada proyeksi Juli 2026, atau turun sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan proyeksi April 2026. Revisi ke bawah tersebut mencerminkan *carryover* negatif dari triwulan I 2026, dampak kenaikan harga energi,

serta masih lemahnya keyakinan konsumen. Berbeda dengan proyeksi sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris pada tahun 2026 justru direvisi ke atas menjadi 1,0% (yoy), atau naik sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan proyeksi April 2026, seiring dengan prakiraan meredanya dampak guncangan energi.

Laju pertumbuhan negara berkembang seperti Cina dan India diperkirakan bergerak ke arah yang berbeda dibandingkan proyeksi April 2026 oleh IMF. Laju pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 4,6% (yoy), atau direvisi ke atas sebesar 0,2% (yoy) dibandingkan proyeksi April 2026. Namun demikian, laju pertumbuhan India pada tahun 2026 diperkirakan berada pada angka 6,4% (yoy), atau direvisi ke bawah sebesar 0,1% (yoy) dibandingkan proyeksi April 2026. Kendati demikian, India tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara utama dunia, sejalan dengan masih kuatnya momentum konsumsi swasta dan aktivitas sektor jasa.

Berbeda dengan proyeksi sebelumnya, laju inflasi global pada tahun 2026 diperkirakan kembali meningkat. Rata-rata inflasi tahunan global (*World Consumer Prices*) diperkirakan naik dari 4,1% (yoy) pada tahun 2025 menjadi 4,7% (yoy) pada tahun 2026, sebelum kembali turun menjadi 3,9% (yoy) pada tahun 2027. Angka proyeksi tersebut mengalami revisi ke atas sebesar 0,3% (yoy) untuk tahun 2026 dan 0,2% (yoy) untuk tahun 2027 dibandingkan proyeksi April 2026. Peningkatan inflasi global pada tahun 2026 tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan, sehingga tren disinflasi yang telah berlangsung sejak awal tahun 2024 diperkirakan terhenti.

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Inflasi nasional pada tahun 2025 juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Angka tersebut dapat dicapai dengan dukungan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Walaupun demikian, secara umum terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2026, baik dari sisi global maupun sisi domestik.

Dari sisi tantangan global, perekonomian Indonesia diperkirakan akan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantaranya yaitu: (i) Meningkatnya potensi konflik geopolitik, khususnya di timur tengah yang mendorong harga energi global; (ii) Tingginya utang publik dunia, baik di negara maju maupun *Emerging Markets*; (iii) Meningkatnya volatilitas pasar uang global, khususnya risiko dari lembaga keuangan *non-bank* (*Non-Bank Financial Institutions*).

Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia diperkirakan akan dihadapi tantangan seperti tren pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke informal. Selain dari itu dampak berkelanjutan dari kebijakan realokasi anggaran juga diperkirakan berdampak pada sektor konstruksi dan sektor penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman.

Di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai tantangan perekonomian domestik, ekonomi Aceh pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh meningkat. Untuk keseluruhan tahun 2026, ekonomi Aceh diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,60% - 5,10% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan akan ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi pemerintah seiring dengan peningkatan realisasi belanja khususnya belanja pemerintah pusat di daerah dalam rangka rehab rekon pascabencana. Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja investasi juga diperkirakan meningkat seiring dengan proses pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang terdampak bencana. Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap resilien. Hal ini turut didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang berada pada target nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Kinerja ekspor komoditas Aceh di tahun 2026 diperkirakan masih terbatas. Hal ini seiring dengan termoderasinya permintaan impor batu bara dari India akibat *shifting* permintaan ke Russia dengan kalori lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat *oversupply* batu bara dunia secara umum yang turut menurunkan harga batu bara dunia. Di sisi lain, ekspor kopi dan CPO juga diperkirakan masih terbatasnya pemulihan produksi khususnya di daerah penghasil, seperti Kab. Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Dari sisi harga, harga komoditas batubara dan CPO diperkirakan akan meningkat, namun harga komoditas kopi akan mengalami penurunan. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia pada *Commodity Markets Outlook* bulan April 2026, harga acuan batubara (berdasarkan *Australian Benchmark Coal Price*) diperkirakan akan meningkat hingga 19,9% (yoy) pada akhir 2026, seiring dengan peningkatan harga energi dunia akibat konflik di timur tengah. Demikian halnya dengan harga komoditas minyak sawit (CPO), diperkirakan meningkat dari US\$1.007/Mt di tahun 2025, menjadi US\$1.089/Mt di tahun 2026. Sementara, Namun demikian, harga kopi arabika diperkirakan akan berangsur turun dari harga US\$8.47/Kg di tahun 2025 ke harga US\$7.25/Kg di tahun 2026, sejalan dengan tren penurunan harga yang terjadi sejak pertengahan tahun 2025. Turunnya harga kopi arabika disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi kopi di Brazil, serta perbaikan kondisi cuaca di Amerika Tengah dan Selatan.

Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih ditopang oleh kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) strategis seperti LU Konstruksi, LU Pengolahan, dan LU Perdagangan. Hal ini seiring dengan percepatan progres rekonstruksi jalur distribusi dan rehabilitasi daerah terdampak bencana. Kinerja LU Konstruksi di tahun 2026 diperkirakan terakselerasi seiring dengan percepatan proses rekonstruksi daerah yang terdampak bencana dan akselerasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Sejalan dengan LU Konstruksi, LU Perdagangan diperkirakan meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas konsumsi dan mulai pulihnya jalur distribusi di Aceh pascabencana hidrometeorologi. Merespons membaiknya permintaan, kinerja LU industri Pengolahan diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya permintaan domestik serta normalisasi kapasitas produksi industri kimia di KEK Arun pascabencana hidrometeorologi.

6.2. Prospek Inflasi

Dari sisi global, berdasarkan laporan WEO edisi Juli 2026, inflasi global akan sedikit meningkat. Inflasi global pada tahun 2026 direvisi naik ke level 4,7% (yoy), dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 0,3%. Peningkatan inflasi pada tahun ini utamanya didorong oleh kenaikan harga pangan dan energi global.

Risiko utama inflasi global bersumber dari eskalasi konflik Timur Tengah yang berpotensi memperpanjang volatilitas harga komoditas dan mendisrupsi rantai pasok global. Hal ini berisiko meningkatkan harga komoditas pangan akibat gangguan pasokan pupuk dan energi, yang dampaknya akan sangat menekan negara-negara berkembang berpendapatan rendah..

Namun, laju inflasi Provinsi Aceh sepanjang tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dan berada di dalam rentang sasaran nasional $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Dari kelompok pangan, tingkat inflasi diperkirakan menurun sejalan dengan pemulihan jalur distribusi logistik, yang turut diakselerasi oleh beroperasinya Tol Sigli-Banda Aceh serta perbaikan infrastruktur pertanian dan pertambakan pascabencana. Lebih lanjut, program rehabilitasi lahan, penyaluran bantuan benih unggul, dan pupuk diharapkan mampu memulihkan kapasitas sentra produksi untuk mendorong kemandirian pangan, dengan fokus utama pada pemberdayaan petani sebagai produsen. Terjadinya *high base effect* pada akhir tahun 2025 juga mendorong kelompok ini untuk mencatatkan deflasi pada penghujung tahun laporan. Walaupun pasokan diperkirakan membaik, masih terdapat *upside risks* akibat fenomena sulitnya harga pangan untuk turun yang memberikan *second-round effect* terhadap tingginya harga komoditas turunan, seperti nasi dengan lauk.

Pada kelompok pengeluaran transportasi, tembakau, serta bahan bakar rumah tangga, tekanan inflasi diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Hal ini sebagai dampak transmisi dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia dan komoditas turunannya. Kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya biaya logistik. Meskipun demikian, laju inflasi pada kelompok ini diperkirakan tertahan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2026.

Sementara itu, pada komoditas emas perhiasan dan penyediaan makanan dan minuman/restoran, tekanan inflasi diproyeksikan masih akan berlanjut. Konflik geopolitik yang berkepanjangan terus memicu volatilitas harga pada komoditas emas perhiasan hingga nilai tukar dolar AS. Di samping itu, tekanan juga didorong oleh fenomena *second round effect* pada komoditas makanan siap saji, khususnya nasi dengan lauk karena kenaikan harga bahan baku dan operasional. Hal ini terlihat dari kenaikan harga komoditas tersebut yang terus berlanjut pascabencana.

TPID Aceh terus mengakselerasi berbagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi. Terdapat sejumlah program strategis untuk pengendalian inflasi, diantaranya yaitu Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Inisiatif ini diimplementasikan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat fundamental ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut dipadukan dengan kerangka strategi 4K, yang meliputi penjaminan Ketersediaan Pasokan, pemastian Keterjangkauan Harga, optimalisasi Kelancaran Distribusi, serta penguatan Komunikasi Efektif, khususnya yang berfokus pada sinergi antar lembaga. Melalui kebijakan tersebut, volatilitas harga di tingkat konsumen diharapkan dapat diredam, sehingga laju inflasi daerah tetap terjaga stabil di dalam rentang sasaran nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$.

6.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. ***Restore Faster, Build Back Better: Mempercepat progres rekonstruksi jalur distribusi utama melalui prioritas koridor dan peningkatan kualitas infrastruktur.*** Hal ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan pada sejumlah titik strategis yang menjadi tumpuan logistik antar kabupaten dan antar provinsi, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum pada titik yang berpotensi mengalami kerusakan berulang.

Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan penetapan target pencapaian lintas perangkat daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Dinas PUPR Provinsi, Balai Wilayah Sungai) untuk: (i) Menetapkan sejumlah koridor distribusi prioritas (akan dijadikan prioritas utama rekonstruksi), (ii) Menetapkan kontrak kerja berdasarkan *output* dan tenggat waktu, (iii) Menerapkan standar teknis konstruksi adaptis (drainase, proteksi lereng, elevasi badan jalan, desain jembatan tahan arus, dll.) agar risiko *shock* berulang tidak terjadi.

2. ***Faster Recovery, Higher Harvest: Mempercepat rehabilitasi lahan pertanian untuk mendorong sektor pertanian dan mengendalikan inflasi.*** Kebijakan diarahkan pada dua klaster: (a) pemulihan produksi melalui rehabilitasi irigasi/alsintan, bantuan benih cepat tanam, pemulihan lahan pascabanjir, serta *restocking* perikanan/ternak; (b) manajemen pasokan melalui penguatan operasi TPID berbasis data stok dan distribusi antardaerah untuk menjaga stabilitas harga. Relevansinya meningkat mengingat inflasi tahunan Aceh masih tinggi pada Januari 2026.
3. ***Public-Private Partnership: Menjadikan proyek rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum sebagai salah satu jalan (Pipeline) untuk meningkatkan kinerja investasi.*** Pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, dapat dijadikan kesempatan dan momen untuk menyajikan sebagian dari proyek rekonstruksi untuk turut dibangun dan didukung oleh pihak swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan Proyek Siap Eksekusi (desain matang, kepastian lahan, skema pendanaan jelas: APBD/DAK/KPBU/dll.) yang berfokus pada rekonstruksi untuk dipresentasikan ke calon investor.
4. ***Risk-Adjusted Export Strategy: Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan ekspor komoditas non-tambang.*** Struktur ekspor Aceh masih sangat bergantung pada komoditas batu bara, dengan pangsa sebesar 68,91% dari total ekspor. Selain dari itu, ekspor komoditas terkonsentrasi pada satu pasar, yaitu pasar India dengan pangsa 90,17% dari total ekspor batu bara. Hal ini menyebabkan kinerja ekspor Aceh sangat rentan terhadap pergerakan harga batu bara global dan produktivitas lahan pertambangan. Pelemahan permintaan di India juga akan langsung menekan kinerja ekspor Aceh secara keseluruhan. Kebijakan ekspor di tahun 2026, perlu menggeser strategi dari “*Volume Driven*” khususnya pada sektor tambang, menjadi *Risk-Adjusted Export Strategy* dengan mengedepankan penguatan ekspor komoditas non-tambang unggulan Aceh seperti Kopi, Nilam, dan Minyak Kelapa Sawit (CPO). Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan: (I) Membentuk Satuan

Tugas (Satgas) Diversifikasi Ekspor, untuk mengkurasi unit usaha, mencari investor, serta peninjauan dan pembukaan pasar internasional baru; (ii) Penguatan komoditas ekspor non-tambang dengan optimalisasi fasilitas pendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi ekspor langsung via pelabuhan Aceh untuk ekspor CPO, standarisasi mutu dan kemasan, serta dan peningkatan sarpras unit usaha untuk pengolahan Kopi, Nilam, dan Perikanan.

5. **Peningkatan daya beli masyarakat melalui strategi *Cash-for-Work* untuk proses pemulihan dampak bencana.** Bencana hidrometeorologi berdampak pada kelangsungan hidup dan mata pencarian 2.584.067 orang masyarakat dan sejumlah 670.826 keluarga di 18 Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat melakukan pemulihan/pembersihan daerah yang terdampak bencana dengan menerapkan strategi *cash-for-work* dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat untuk membantu mempercepat proses pemulihan. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal, hal ini juga diperkirakan akan turut memulihkan pendapatan masyarakat setempat yang hilang akibat bencana tersebut.
6. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan dan mendorong peningkatan nilai tambah UMKM.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2026. Penyaluran KUR dan UMI tentunya harus turut diiringi dengan pengembangan kapabilitas UMKM yang terlibat, khususnya pada literasi keuangan dan pembukuan. Dalam hal ini, digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS dan Mesin POS (*Point-of-Sales*) juga akan mempermudah pelaku usaha dalam proses pembukuan dan pencatatan keuangan usaha. UMKM dengan pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik tentunya akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk memperluas skala usahanya.

Inflasi

Untuk menjaga inflasi berada pada sasarannya, perlu langkah-langkah antisipatif melalui program-program pengendalian inflasi seperti GPIPS, dengan tetap berpedoman pada strategi 4K. Adapun rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. **Menjaga Ketersediaan Pasokan**, antara lain melalui penguatan koordinasi antarlembaga dalam mempercepat rehabilitasi pascabencana serta akselerasi Kerjasama Antar

Daerah (KAD) yang menghubungkan wilayah sentra dan nonsentra. Dari sisi produksi, upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui optimalisasi *Good Agricultural Practices* (GAP), replikasi *best practice*, dan adopsi teknologi pertanian modern (termasuk *urban farming*), yang didukung oleh pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu. Langkah ini turut didorong melalui fasilitasi skema *contract farming* dan hilirisasi pangan guna menjamin kepastian pasar, ketersediaan pasokan, serta stabilitas harga. Selain itu, dapat disempurnakan melalui pemanfaatan *cold storage*, khususnya bagi komoditas perikanan dan pertanian, dalam menjaga kualitas produk dan memperpanjang masa simpan di sepanjang rantai pasok.

2. **Memastikan Keterjangkauan Harga**, yang difokuskan pada upaya mengembalikan harga ke tingkat normal dan stabilisasi pasar melalui operasi pasar murah (antara lain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP dan Gerakan Pangan Murah/GPM) di 23 kabupaten/kota, yang dilaksanakan pada waktu dan lokasi yang tepat sasaran. Upaya ini diperkuat dengan pemberian Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) bagi komoditas pangan, serta pelaksanaan sidak di pasar secara berkala untuk memastikan kestabilan harga di tingkat konsumen. Dari sisi hulu, dilakukan penyaluran bantuan dan peningkatan kapasitas petani, khususnya di wilayah terdampak bencana, serta sinergi dengan BUMN dalam menjamin ketersediaan energi dan cadangan pangan pemerintah.
3. **Optimalisasi Kelancaran Distribusi**, dengan fokus utama pada peningkatan konektivitas antardaerah untuk mendukung distribusi logistik bahan pangan. Selain itu, dapat dilakukan fasilitasi kerja sama antara UMKM pangan dengan *platform e-commerce* untuk memperluas jangkauan pasar. Optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Bulog untuk memperlancar distribusi bahan pangan penting ke berbagai daerah.
4. **Penguatan Komunikasi Efektif**, melalui peningkatan akses informasi dan transparansi harga serta pasokan antardaerah, optimalisasi koordinasi TPID, dan pengendalian ekspektasi inflasi. Dalam hal transparansi, berbagai survei perkembangan harga seperti Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai referensi *early warning system* dalam perumusan kebijakan inflasi. Di sisi lain, penguatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga direalisasikan melalui penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota,

penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM), serta pelaksanaan *capacity building*. Strategi komunikasi ini turut dilengkapi dengan sinergi aktif bersama media massa guna menjaga ekspektasi masyarakat agar tetap stabil.

5. **Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)**, yang dapat diimplementasikan berdasarkan jangka waktu. Pada jangka pendek, strategi difokuskan pada stabilisasi harga melalui pelaksanaan operasi pasar murah dan sidak pasar, perluasan penyaluran SPHP, serta penguatan KAD baik intra maupun interregional memanfaatkan distribusi logistik BUMN. Langkah ini didukung oleh pelaksanaan *business matching* komoditas pangan, kajian integrasi pasar induk, penerapan *Domestic Market Obligation* (DMO), serta pengembangan *Early Warning System* (EWS) dan Protokol Manajemen Inflasi. Sementara itu, program jangka menengah-panjang diarahkan pada penguatan ketahanan struktural melalui piloting benih hortikultura tahan cuaca, penerapan GAP berbasis agroklimat, serta perluasan *awareness* asuransi

pertanian. Upaya ini disempurnakan dengan dukungan sarana pascapanen, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta program pompanisasi dan pembangunan infrastruktur konservasi air di wilayah terdampak bencana.

6. **Mendorong Penguatan Ketahanan Pangan Aceh**, yang secara strategis difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani (Poktan) untuk mendorong produktivitas dan daya tawar petani sebagai produsen utama. Peran BUMDes, Koperasi, serta BUMD turut dioptimalkan sebagai *buffer entity* maupun *offtaker* dalam menyerap surplus produksi hulu maupun melakukan stabilisasi pasokan saat terjadi kelangkaan. Kualitas data pangan ditingkatkan untuk mendukung efektivitas KAD dan akurasi kebijakan, yang diperkuat dengan pemetaan rantai pasok pangan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Seluruh upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi yang didukung oleh perluasan akses pembiayaan di sektor pangan.



Daftar Istilah

Administered price

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/ kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.

Faktor Non Fundamental

Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (*volatile foods*), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (*administered price*).

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Inflasi inti

Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan

Migas

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Perceived risk

Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara

QTQ

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Sektor ekonomi dominan

Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Volatile food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

YOY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab
Agus Chusaini

Koordinator Penyusun
Hendy Hadiyan

Tim Penulis
Hafidz Yudhansyah
Muhammad Raziq Ilmi
Muhammad Kahfi
Hafidz Bramandito
Hana Nabillah
Dwina Olivia Rahmi
Kristina Panduwinata



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI ACEH**

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia
Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116
<https://www.bi.go.id>

